



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Tahun 2024 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PUPKP



Umi Akhsanti, M.T.

NIP. 19720926 199803 2 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah

Dengan Indikator Kinerja : Indeks prasarana umum wilayah

Formula Indikator : [35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100 dari target 90.31 % terealisasi 92.16 % atau tercapai 102.05 %.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Dengan Indikator Kinerja : Indeks prasarana perumahan dan permukiman

Formula Indikator : [50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100 dari target 56.52% terealisasi 60.25% atau tercapai 106.61%.

Sasaran 2 : Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan Indikator Kinerja : Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Formula indikator: Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, capaian yang dihasilkan adalah A dari target A dengan capaian sebesar 100%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I	11
PENDAHULUAN.....	11
1.1 Struktur Organisasi.....	12
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	14
1.3 Isu-isu Strategis.....	15
1.4 Kepegawaian	16
1.5 Sarana dan Prasarana	18
1.6 Keuangan.....	19
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	23
1.8 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	25
BAB II	27
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	27
2.1 Perencanaan Strategis	27
2.2 Visi dan Misi Kota Yogyakarta	27
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	30
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
2.5 Metadata Sasaran Strategis	32
2.6 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	38
2.7 Cascading/Pohon Kinerja	41
2.8 Perjanjian Kinerja	43
2.9 Keuangan.....	45
2.10 Target Belanja	45
2.11 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	45
BAB III	48
AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	48
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	49
3.2.1 Sasaran Strategis (Analisa per Sasaran Strategis)	49
3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2026.....	50



3.2.3 Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	51
3.2.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra .	52
3.2.5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	52
3.2.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	54
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	54
A. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	55
A.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga	55
A.2 Capaian Kinerja Pengelolaan SDA dan Sistem Drainase	61
A.2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air.....	61
A.2.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....	63
A.3 Capaian Kinerja Penataan Bangunan Gedung	67
A.4 Capaian Kinerja Pengembangan Jasa Konstruksi	75
A.5 Capaian Kinerja Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan	79
B. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	82
B.1 Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman	82
B.2 Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	87
B.3 Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan	91
B.4 Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	95
B.5 Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	100
C. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	102
C.1 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	102
3.3 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja	124
3.4 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja	127
BAB IV	132
PENUTUP	132
LAMPIRAN	135



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Komposisi PNS berdasarkan pangkat dan golongan	16
Tabel 1.4.2 Komposisi pegawai ASN menurut jenjang pendidikan tahun 2024.....	17
Tabel 1.4.3 Komposisi penyedia jasa layanan orang perseorangan (PJLOP) menurut jenjang pendidikan tahun 2024.....	17
Tabel 1.4.4 Data jumlah ASN dan PJLOP berdasarkan jenis kelamin tahun 2024.....	17
Tabel 1.4.5 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja	17
Tabel 1.5.1 Kondisi sarana dan prasarana Dinas PUPKP per-31 Desember 2024	18
Tabel 1.6.1 Anggaran dan pendapatan Dinas PUPKP tahun 2024	19
Tabel 1.8.1 Matriks Tidak Lanjut Penilaian Komponen Manajemen Kinerja DPUPKP tahun 2023	25
Tabel 2.2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.....	28
Tabel 2.3.1 Tujuan/Sasaran Strategis DPUPKP	30
Tabel 2.4.1 Indikator Kinerja Utama DPUPKP Tahun Anggaran 2023-2026	31
Tabel 2.5.1 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP Tahun Anggaran 2023-2026	32
Tabel 2.5.2 Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah DPUPKP Tahun 2023-2026.....	35
Tabel 2.6.1 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPKP	38
Tabel 2.11.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPUPKP	43
Tabel 2.11.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPUPKP.....	44
Tabel 2.9.1 Target Belanja DPUPKP APBD Perubahan Tahun 2024	45
Tabel 2.10.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024	46
Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024	48
Tabel 3.2.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024	50
Tabel 3.2.3.1 Pengukuran Indikator Tujuan/Sasaran dengan Tahun 2023.....	51
Tabel 3.2.4.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra	52
Tabel 3.2.7 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimal.....	53
Tabel 3.2.7.1 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II.....	55
Tabel 3.2.7.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penyelenggaraan Jalan	56
Tabel 3.2.7.3 Indikator Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga	57
Tabel 3.2.7.4 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024	57
Tabel 3.2.7.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY.....	58
Tabel 3.2.7.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	61
Tabel 3.2.7.7 Indikator Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).....	61
Tabel 3.2.7.7 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan Sumber Daya Air.....	62
Tabel 3.2.7.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	64
Tabel 3.2.7.9 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	64
Tabel 3.2.7.10 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	64
Tabel 3.2.7.11 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan Gedung.....	67



Tabel 3.2.7.12 Indikator Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik.....	68
Tabel 3.2.7.13 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik.....	68
Tabel 3.2.7.14 Indikator Persentase Pelaksanaan Konsultasi Permohonan PBG dan SLF ..	69
Tabel 3.2.7.15 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Konsultasi Permohonan PBG dan SLF.....	69
Tabel 3.2.7.16 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY.....	70
Tabel 3.2.7.17 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY.....	70
Tabel 3.2.7.18 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan Gedung.....	75
Tabel 3.2.7.19 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Tersertifikasi.....	76
Tabel 3.2.7.20 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	77
Tabel 3.2.7.21 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	79
Tabel 3.2.7.22 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Tersertifikasi.....	79
Tabel 3.2.7.23 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	80
Tabel 3.2.7.24 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II.....	82
Tabel 3.2.7.25 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Kawasan Permukiman	83
Tabel 3.2.7.26 Indikator Permukiman Kumuh Yang Tertangani	83
Tabel 3.2.7.27 Data Penanganan kumuh kota Yogyakarta tahun 2021–2024.....	83
Tabel 3.2.7.28 Sasaran Sub Kegiatan dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	84
Tabel 3.2.7.29 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY	84
Tabel 3.2.7.30 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang di biayai Dana Keistimewaan DIY	84
Tabel 3.2.7.31 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	87
Tabel 3.2.7.32 Indikator Program Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	88
Tabel 3.2.7.33 Sasaran Sub Kegiatan dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Penataan Bangunan dan Lingkungannya	88
Tabel 3.2.7.34 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024	91
Tabel 3.2.7.35 Indikator Persentase Tercapainya Target Retribusi Sewa Rusun	91
Tabel 3.2.7.35 Indikator Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana Dan Relokasi Program.....	92
Tabel 3.2.7.37 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024	95
Tabel 3.2.7.38 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-S Akses Layak.....	96
Tabel 3.2.7.39 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-S Akses Aman.....	96
Tabel 3.2.7.40 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-T Akses Aman	96
Tabel 3.2.7.41 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	97



Tabel 3.2.7.42 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024	100
Tabel 3.2.7.43 Indikator Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum .	100
Tabel 3.2.7.44 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	101
Tabel 3.2.7.45 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II.....	102
Tabel 3.2.7.46 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103
Tabel 3.2.7.46 Indikator Kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	106
Tabel 3.2.7.47 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	106
Tabel 3.2.9.1 Analisis Kebutuhan Sumber Daya.....	110
Tabel 3.2.10.2 Realisasi Belanja DPUPKP 2024.....	113
Tabel 3.2.10.2 Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis.....	113
Tabel 3.2.10.3 Analisis Efisiensi	114
Tabel 3.2.8.1 <i>Gender Analisis Pathway</i> Program Penyelenggaraan Jalan	116
Tabel 3.2.8.2 <i>Gender Analisis Pathway</i> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	117
Tabel 3.2.8.3 <i>Gender Analisis Pathway</i> Program Penataan Bangunan Gedung.....	118
Tabel 3.2.8.4 <i>Gender Analisis Pathway</i> Program Kawasan Permukiman	120
Tabel 3.2.8.5 <i>Gender Analisis Pathway</i> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.....	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Proses Bisnis DPUPKP.....	12
Gambar 1.1.2 Struktur Organisasi DPUPKP.....	13
Gambar 1.4.1 Apel Rutin Pegawai DPUPKP	18
Gambar 2.7.1 Pohon Kinerja DPUPKP 2023-2026.....	42
Gambar 3.2.7.1 Pemeliharaan Jalan Gedongkuning sisi selatan Sumber: DPUPKP 2024	60
Gambar 3.2.7.2 Pemeliharaan Insidentil Jalan Winong Sumber: DPUPKP 2024	60
Gambar 3.2.7.3 Pemeliharaan Insidentil Jembatan Jalan Sudirman Sumber: DPUPKP 2024	60
Gambar 3.2.7.4 Sosialisasi Gangguan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Melalui Media Sosial Sumber: DPUPKP 2024.....	60
Gambar 3.2.7.5 Pekerjaan Rehabilitasi Talud Sungai Gajah Wong Kel. Giwangan.....	63
Gambar 3.2.7.6 Pekerjaan SAH Kelurahan Giwangan RW 13	66
Gambar 3.2.7.7 Pekerjaan SPAH terintegrasi SAH di Panembahan Kraton	66
Gambar 3.2.7.8 Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II	73
Gambar 3.2.7.9 Pembangunan SMP Negeri 10	73
Gambar 3.2.7.10 Pelayanan Konsultasi Teknis PBG SLF	73
Gambar 3.2.7.11 Proses Cek Lokasi Pemohon PBG SLF.....	74
Gambar 3.2.7.12 Sosialisasi PBG SLF ke Masyarakat.....	74
Gambar 3.2.7.13 Kegiatan Bimbingan Teknis.....	78
Gambar 3.2.7.14 Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi	78
Gambar 3.2.7.15 Perbaikan lampu hias Jl. Cik Di Tiro	81
Gambar 3.2.7.16 Perbaikan PJU Jl. Tukangan.....	81
Gambar 3.2.7.17 Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban.....	85
Gambar 3.2.7.18 Peningkatan Kualitas RTLH TMMD	86
Gambar 3.2.7.19 Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta.	86
Gambar 3.2.7.20 Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Terban RT.002 RW. 001 (DAK+APBD)..	90
Gambar 3.2.7.21 Pembangunan Talud Permukiman Kelurahan Kricak RW. 01.....	90
Gambar 3.2.7.22 Pemeliharaan Bangunan Rusun Cokrodirjan.....	94
Gambar 3.2.7.23 Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana di Kawasan Sungai Gajah Wong	94
Gambar 3.2.7.24 Pembangunan IPAL Komunal Pringgokusuman	98
Gambar 3.2.7.25 Pembangunan Sambungan Rumah dan Sambungan Pembawa Kelurahan Tahunan	99
Gambar 3.2.7.26 Pembangunan Sambungan Rumah dan Sambungan Pembawa Kelurahan Pakuncen.....	99
Gambar 3.2.7.27 Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Pingit).....	99
Gambar 3.3.1.1 Pola Penanganan melalui Konsolidasi Lahan.....	124
Gambar 3.3.1.2 Penataan Konsolidasi Lahan Terban RT 02 RW 01.....	125
Gambar 3.3.2.1 Pemanfaatan Aplikasi QRISNA untuk Pembayaran Retribusi Rusunawa	126





**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

YK

BAB I PENDAHULUAN

- 1. STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- 3. ISU-ISU STRATEGIS**
- 4. KEPEGAWAIAN**
- 5. SARANA PRASARANA**
- 6. KEUANGAN**
- 7. SISTEMATIKA LKIP**
- 8. TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Hubungan antara peta proses bisnis dan desain struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan pada bagan berikut:

a. Proses Bisnis DPUPKP

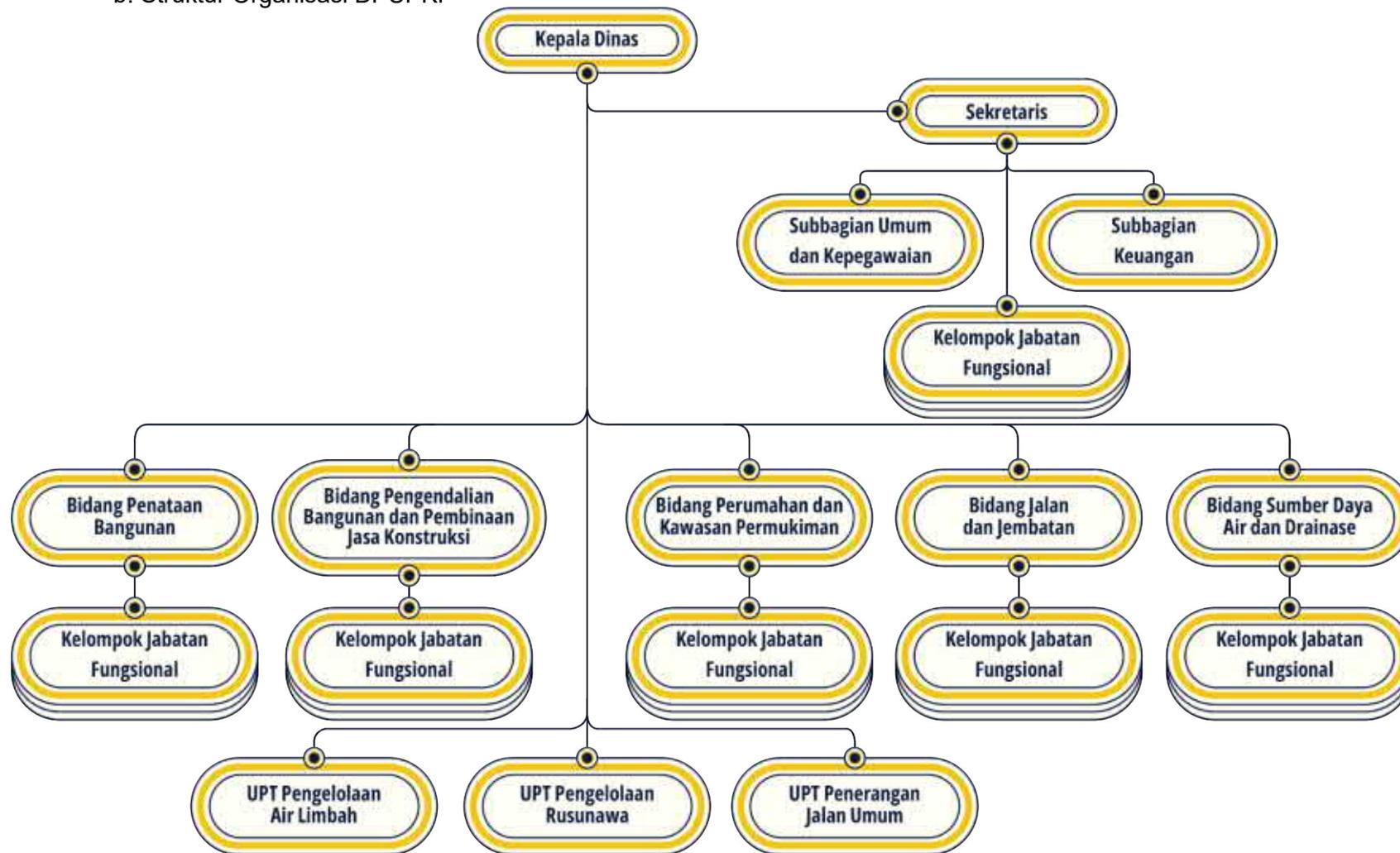


Gambar 1.1.1 Proses Bisnis DPUPKP

Sumber: DPUPKP 2024



b. Struktur Organisasi DPUPKP



Gambar 1.1.2 Struktur Organisasi DPUPKP

Sumber: DPUPKP 2024



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah daerah;
- f. Pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan *Detail Engineering Design* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan Informasi Dinas;
- p. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;



- q. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintah Dinas;
- r. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas pengembalian galian akibat pekerjaan utilitas milik pihak eksternal yang memiliki kewenangan terhadap utilitas yang memanfaatkan ruang milik jalan. Kondisi jalan yang sudah rusak karena pelaksanaan proyek tersebut harus segera diperbaiki karena sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan;
2. Permasalahan drainase perkotaan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya integrasi dari wilayah sekitar terutama Kabupaten Sleman (bagian hulu) dan Kabupaten Bantul (daerah hilir). Saluran drainase yang melintas di suatu kawasan seringkali dikaitkan dengan keberadaan genangan di kawasan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama antar kabupaten/kota untuk mengatasi permasalahan genangan di daerah perbatasan kabupaten/kota;
3. Konstruksi talud rata-rata terlalu curam kemiringannya karena terdesak lahan permukiman;
4. Usia talud rata-rata sudah berumur di atas 20 tahun sehingga perlu di rehabilitasi.
5. Adanya sisa luasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sebesar 80,94 ha yang sebagian besar terletak di bantaran dan non bantaran;
6. Masih banyaknya titik lampu PJU yang belum menggunakan teknologi LED ramah lingkungan sehingga mengakibatkan tingginya biaya operasional dan belum ramah lingkungan;
7. Belum semua bangunan gedung pemerintah, kesehatan dan pendidikan memiliki sarana prasarana yang mendukung disabilitas;



8. Belum semua tenaga kerja konstruksi di Kota Yogyakarta memiliki sertifikat untuk itu diperlukan pendorong untuk lebih meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi di wilayah Kota Yogyakarta;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait sanitasi aman. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala, sehingga berpotensi mencemari kualitas air tanah;
10. Terdapat bangunan hunian rumah susun yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar bangunan gedung, sehingga diperlukan rehabilitasi total bangunan tersebut.

1.4 Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman terhitung per Desember 2024 didukung oleh pegawai sebanyak 91 orang PNS, 7 orang PPPK, 39 orang Penyedia Jasa Layanan Orang Perseorangan (PJLOP), yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4.1 Komposisi PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/Gol.IV.c	1
Sekretaris	Pembina / Gol.IV.a	1
Kepala Bidang	Pembina / Gol.IV.a	4
	Penata Tingkat I-III/d	1
Kepala UPT	Pembina / Gol.IV.a	1
Kepala Sub Bagian/Seksi	Penata Tingkat I-III/d	2
Kepala UPT	Penata Tingkat I-III/d	2
Kepala Sub Bagian/Seksi	Penata-III/c	1
	Penata-III/b	2
Fungsional Ahli Muda	Pembina / Gol.IV.a	3
	Penata Tingkat I – III/d	4
Staff	Pembina / Gol.IV.a	1
	Penata Tingkat I-III/d	1
	Penata-III/c	3
	Penata Muda TK I / Gol.III.b	11
	Penata Muda / Gol.III.a	19
	Pengatur TK I/ Gol.II.d	6
	Pengatur / Gol.II.c	20
	Pengatur Muda TK /Gol II.b	4
	Pengatur Muda TK /Gol II.a	1
	Juru TK I / I.d	3



Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah
PPPK	XI	7

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

Tabel 1.4.2 Komposisi pegawai ASN menurut jenjang pendidikan tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	16
2	S1	35
3	D3	19
4	SMA/SMK	23
5	SMP	5
6	SD	0

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

Tabel 1.4.3 Komposisi penyedia jasa layanan orang perseorangan (PJLOP) menurut jenjang pendidikan tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S1	14
2	D3	5
3	SMA/SMK	20

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

Tabel 1.4.4 Data jumlah ASN dan PJLOP berdasarkan jenis kelamin tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	Pria	90
2	Wanita	47

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

Tabel 1.4.5 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja

No	Kelompok Jabatan/Sub Bag/Seksi	Jumlah Pegawai	
		Eksisting	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Jabatan Fungsional	25	25
3	Sekretariat	8	18
4	Bidang Penataan Bangunan	5	16
5	Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	9	25
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	5	12
7	Bidang Jalan Jembatan	7	16
8	Bidang Pengairan dan Drainase	6	14
9	UPT Pengelolaan Rumah Susun	9	13
10	UPT Pengelolaan Air Limbah	17	22



No	Kelompok Jabatan/Sub Bag/Seksi	Jumlah Pegawai	
		Eksisting	Ideal
11	UPT Penerangan Jalan Umum	6	16
Jumlah		98	178

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.



Gambar 1.4.1 Apel Rutin Pegawai DPUPKP

1.5 Sarana dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi:

Tabel 1.5.1 Kondisi sarana dan prasarana Dinas PUPKP per-31 Desember 2024

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 6	13	5	-	18
3	Kendaraan Roda 4	19	4	-	23
4	Kendaraan Roda 3	2	7	-	9
5	Kendaraan Roda 2	27	10	-	37
6	Komputer Desktop	101	-	2	103
7	Komputer Laptop	25	-	2	27
8	Printer	57	-	-	57
9	Air Conditioning	42	-	-	42



No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi dan Jumlah			Jumlah (unit)
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
10	UPS	105	-	2	107

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPUPKP, Desember 2024

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Yogyakarta, Dana Keistimewaan, DAK Bidang Sanitasi dan Bidang Permukiman. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6.1 Anggaran dan pendapatan Dinas PUPKP tahun 2024

PENDAPATAN				4,239,587,000
BELANJA DAERAH				204,641,433,109
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				120,075,753,805
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			18,163,241,375
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		343,165,240
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,800,000
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,092,400
		1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,632,400
		1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,535,750
		1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,037,300
		1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275,067,390
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13,361,523,750
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,263,076,750
		2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	98,447,000
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		711,693,385
		3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,276,100
		3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256,137,785
		3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123,542,500



		3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,100,000
		3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316,637,000
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,386,505,000
		4.1	Pengadaan Mebel	432,290,000
		4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	954,215,000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		546,498,000
		5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,430,000
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228,960,000
		5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292,108,000
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,813,856,000
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,044,000
		6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,182,072,000
		6.3	Pemeliharaan Mebel	20,000,000
		6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128,700,000
		6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	432,040,000
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			6,290,324,295
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5,196,870,946
		1.1	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1,750,986,808
		1.2	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3,445,884,138
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,093,453,349
		2.1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,093,453,349
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			10,110,000



	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10,110,000
	1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10,110,000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		13,800,430,041
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,800,430,041
	1.1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1,857,776,100
	1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	7,113,399,861
	1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4,829,254,080
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		16,706,180,364
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,706,180,364
	1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	11,743,857,998
	1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	4,962,322,366
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		32,073,314,930
	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	32,073,314,930
	1.1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29,268,042,280
	1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,797,664,150
	1.3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	1,007,608,500
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		32,082,589,900
	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	32,082,589,900



		1.1	Pemeliharaan Berkala Jalan	22,973,231,900
		1.2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,180,100,000
		1.3	Pemeliharaan Rutin Jalan	7,929,258,000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			546,842,900
	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		304,659,900
		1.1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	120,000,000
		1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	77,709,900
		1.3	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	106,950,000
	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		242,183,000
		1.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	155,547,000
		1.2	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	86,636,000
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			402,720,000
	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		402,720,000
		1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	402,720,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34,833,139,930
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				34,833,139,930
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			34,833,139,930
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		34,833,139,930
		1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	34,833,139,930
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				22,219,453,374
XI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			6,344,072,925
	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		6,344,072,925
		1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5,916,524,125



		1.2	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	427,548,800
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1,749,388,260
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		97,300,000
		1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	97,300,000
	2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1,652,088,260
		2.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,652,088,260
XIII	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			14,125,992,189
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		14,125,992,189
		1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10,899,112,150
		1.2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3,226,880,039
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27,513,086,000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN				27,513,086,000
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			27,513,086,000
	1	Pengelolaan Taman Budaya		26,928,086,000
		1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	26,928,086,000
	2	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		585,000,000
		2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	585,000,000
JUMLAH				204,641,433,109

Sumber : DPPA tahun 2024

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran



utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sistematika penulisan LKIP.

3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang belum ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

5. LAMPIRAN



1.8 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.8.1 Matriks Tidak Lanjut Penilaian Komponen Manajemen Kinerja DPUPKP tahun 2023

No	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Pengukuran Kinerja	Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja. Data kinerja yang digunakan bukan data pada tahun pelaporan.	Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala agar data yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja relevan dengan tahun pelaporan	Telah melakukan perbaikan data kinerja melalui koordinasi dengan bidang pengampu data program	Review data perbaikan kinerja
2	Pelaporan Kinerja	Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja karena terdapat data yang kurang relevan dalam penghitungan indikator sasaran program	Meningkatkan kualitas kinerja dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan menyajikan data yang relevan terkait penghitungan indikator program yang akan mempengaruhi penghitungan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Akan meningkatkan kualitas laporan kinerja dan memperbaiki perhitungan indikator program yang akan mempengaruhi perhitungan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Review data perbaikan kinerja





BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

- 1. PERENCANAAN STRATEGIS**
- 2. VISI MISI KOTA YOGYAKARTA**
- 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 5. METADATA SASARAN STRATEGIS**
- 6. STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- 7. CASCADING/POHON KINERJA**
- 8. PERJANJIAN KINERJA**
- 9. KEUANGAN**
- 10. TARGET KINERJA**
- 11. ALOKASI ANGGARAN SASARAN STRATEGIS**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2024 memasuki tahun ke-2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022). RPD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 2023–2026 memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026.

2.2 Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 2.2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026

Visi	: Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan
Misi	: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan	
Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana jalan	Memelihara Jalan Secara Berkala	
			Memelihara Jalan Secara Rutin	
			Memelihara Jembatan Secara Rutin	
		Meningkatkan kualitas perlengkapan jalan	Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Meningkatkan Kualitas saluran pengairan	Membangun Bangunan Perkuatan Tebing
				Merehabilitasi Tanggul Sungai
		Beroperasi dan Memelihara Tanggul dan Tebing Sungai		
		Meningkatkan pemenuhan drainase ramah lingkungan di kota yogyakarta	Beroperasi dan Memelihara Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatkan pemenuhan drainase ramah lingkungan di kota yogyakarta	Membangun Saluran Drainase Perkotaan
				Beroperasi dan Memelihara Sistem Drainase
		Meningkatkan Pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Meningkatkan Pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Menyusun Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
				Melaksanakan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu	Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu	Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung
		Meningkatkan pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	Meningkatkan pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	Meningkatkan pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi
Memfasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				
Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				
Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				



Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
			Menyediakan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
		Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Melaksanakan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
			Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
			Beroperasi dan Memelihara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
		Melaksanakan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) untuk Menunjang Fungsi Hunian	Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Memelihara Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
		Melaksanakan pengelolaan rumah susun	Melaksanakan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Melaksanakan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Menyusun Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Menyusun Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
		Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: RPD tahun 2023-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah diatas dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Infrastruktur wilayah meningkat melalui infrastruktur pekerjaan umum meningkat dan infrastruktur perumahan dan permukiman meningkat.



2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah kota Yogyakarta pada misi ke 8 (delapan) Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana berkualitas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah:

- Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah
- Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
- Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan/sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Tujuan/Sasaran Strategis DPUPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	74,37 Skala 0-100	89,11 Skala 0-100	90,31 Skala 0-100	91,21 Skala 0-100	92,12 Skala 0-100
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	62,28 Skala 0-100	55,37 Skala 0-100	56,52 Skala 0-100	57,53 Skala 0-100	58,53 Skala 0-100
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	73,4 point	BB	A	A	A

Sumber: Kepwal No.267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta



2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama digunakan perencanaan tahunan, penetapan kinerja, pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja. Adapun tabel indikator kinerja utama tercantum dalam tabel 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Indikator Kinerja Utama DPUPKP Tahun Anggaran 2023-2026

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	[35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100	Indeks prasarana umum wilayah dihitung dari pembobotan capaian kinerja pada program penyelenggaraan jalan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan SDA dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; ditambah capaian kinerja program penataan bangunan gedung; ditambah capaian kinerja pada program pengembangan jasa konstruksi; ditambah capaian kinerja pada kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan (UPT PJU)
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	[50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100	Indeks prasarana perumahan dan permukiman dihitung dari pembobotan rata-rata capaian kinerja pada program kawasan permukiman; capaian kinerja pada program penataan bangunan dan lingkungannya; capaian kinerja pada program pengembangan perumahan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat



2.5 Metadata Sasaran Strategis

Metadata merupakan perumusan perencanaan tujuan, sasaran hingga program dan indikator program jangka menengah pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selama kurun waktu sesuai dengan RPD dan Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5.1 Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP Tahun Anggaran 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah dihitung dari pembobotan capaian kinerja pada program penyelenggaraan jalan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan SDA dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; ditambah capaian kinerja program penataan bangunan gedung; ditambah capaian kinerja pada program pengembangan jasa konstruksi; ditambah capaian kinerja pada kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan (UPT PJU)	[35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100	85,36	89,11	90,31	91,21	92,12
			Sumber Data:					
			Capaian kinerja penyelenggaraan jalan/bina marga	92,00%	92,00%	92,25%	92,50%	92,75%
			Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase	89,95%	89,98%	90,51%	90,54%	90,57%
			Capaian kinerja penataan bangunan gedung	95,60%	95,75%	95,90%	96,14%	96,38%
			Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi		65,00%	70,83%	73,70%	76,62%
Meningkatnya kualitas perumahan	Indeks prasarana perumahan	Indeks prasarana perumahan dan permukiman dihitung dari pembobotan rata-rata capaian kinerja pada program kawasan	[50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan	55,18	55,37	56,52	57,53	58,53



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
dan permukiman	dan permukiman	permukiman; capaian kinerja pada program penataan bangunan dan lingkungannya; capaian kinerja pada program pengembangan perumahan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100					
			Sumber Data:					
			Capaian kinerja kawasan permukiman	17,90%	20,52%	34,68%	39,91%	45,14%
			Capaian penataan bangunan dan lingkungannya	93,69%	93,89%	94,98%	95,38%	95,78%
			Capaian pengembangan perumahan	100,50%	98,79%	90,00%	90,40%	90,80%
			Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	32,97%	32,97%	33,13%	33,14%	33,13%
Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan air minum	100,00%	100,00%	100%	100%	100%			
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30) Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomer 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomer 9 karena tidak mengamanatkan RB	Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
		level OPD sehingga disempurnakan dengan Kepwal.						
		Sumber Data						
		Hasil penilaian RB PUPKP oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PUPKP 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PUPKP 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset PUPKP 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN PUPKP 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik						

Sumber: Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023-2026



Tabel 2.5.2 Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah DPUPKP Tahun 2023-2026 Berdasarkan Kepwal Nomor 267 Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					
						2023		Target			2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Target	Realisasi	2024	2025	2026						
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		Indeks prasarana umum wilayah	[35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100	85,36 Indeks	89,11 Indeks	91,04 Indeks	90,14 Indeks	91,14 Indeks	92,05 Indeks	90,31 Indeks	91,21 Indeks	92,12 Indeks			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	(Panjang talud dan saluran kondisi baik / Total panjang talud dan saluran air) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	(Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%	-	92,29%	92,60%	92,31%	92,32%	92,33%	92,63%	92,66%	92,69%			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100%	-	87,66%	88,36%	87,70%	87,73%	87,77%	-	-	-			
			Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase) x 100%	-	-	-	-	-	-	88,40%	88,43%	88,46%			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	-	91,50%	91,52%	91,79%	92,27%	92,75%	91,79%	92,27%	92,75%			
			Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) = (Jumlah penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) / (Jumlah Total teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%	-	92,00 %	95,73%	92,25 %	92,50 %	92,75 %	92,25 %	92,50 %	92,75 %			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	(Jumlah TKK dan BU yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) / (Jumlah Total target peserta pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi / Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan)) / 2 x 100%	-	65,00%	72,75%	70,54%	75,30%	78,46%	-	-	-			
			Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun /	-	-	-	-	-	-	70,83%	73,70%	76,62%			



Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					
						2023		Target			2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Target	Realisasi	2024	2025	2026						
				Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 2 x 100%												
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Indeks prasarana perumahan dan permukiman	[50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100	52,23 Indeks	55,37 Indeks	58,06 Indeks	55,87 Indeks	56,37 Indeks	56,93 Indeks	56,52 Indeks	57,53 Indeks	58,53 Indeks			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	(Jumlah capaian kinerja pelayanan air minum PDAM) / (Jumlah Total kinerja pelayanan air minum PDAM) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septik komunal) / Jumlah total KK x 100%	61,17%	59,85%	59,18%	58,80%	57,74%	56,70%	58,80%	57,74%	56,70%			
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				(Jamban keluarga dengan tangki septick aman) / Jumlah total KK x 100%	-	20,06%	20,50%	21,05%	22,02%	22,96%	21,05%	22,02%	22,96%			
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%	-	19,00%	19,24%	19,06%	19,15%	19,24%	19,52%	19,66%	19,71%			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	(Kawasan dengan sarana prasarana baik / Total kawasan) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %	-	93,89%	94,58%	94,09%	94,29%	94,49%	94,98%	95,38%	95,78%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan) x 100%	-	-	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %			



Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					
						2023		Target			2024	2025	2026	2024	2025	2026
						Target	Realisasi	2024	2025	2026						
		NKEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	keistimewaan urusan kebudayaan													
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%	-	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
			Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%	-	97,58%	110,67%	97,91%	98,27%	99,41%	80,00%	80,80%	81,61%			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	-	20,52 %	29,45%	23,14 %	25,75 %	28,37 %	34,68%	39,91%	45,14%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %	-	75,18%	75,96%	81,45%	87,64%	93,75%	81,45%	87,64%	93,75%			
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	AA Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	-		
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai		

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023-2026



2.6 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.1 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPKP

No	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Mebel				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat



No	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				Rehabilitasi Tanggul Sungai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		Program Penataan Bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk



No	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jembatan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



No	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Program Kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: DPPA DPUPKP 2024

2.7 Cascading/Pohon Kinerja

Cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi pada Dinas PUPKP kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis, dan tertuang dalam tabel berikut ini:



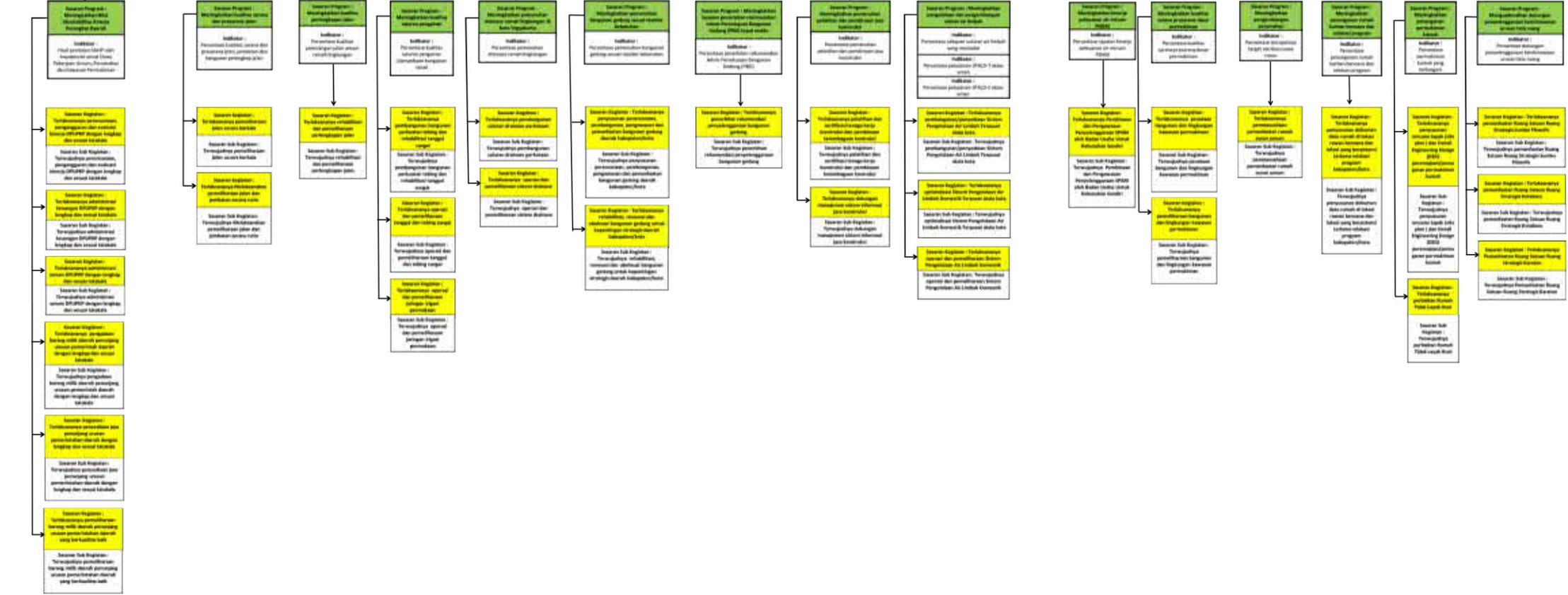
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MISI: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta

INDIKATOR: Kualitas Pelayanan Publik (KPP)

INDIKATOR: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Gambar 2.7.1 Pohon Kinerja DPUPKP 2023-2026



2.8 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Perbaikan Kinerja yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 261 Tahun 2023 atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan hasil review indikator program pada Renstra Tahun 2023 -2026. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPUPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,14 indeks Skala 0 - 100
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	55,87 indeks Skala 0 - 100
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp17.910.312.525,-	APBD TA 2024
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp6.519.570.157,-	APBD TA 2024
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota	Rp8.360.000,-	APBD TA 2024
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp12.936.454.080,-	APBD TA 2024
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp16.252.118.366,-	APBD TA 2024
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp35.696.007.940,-	APBD TA 2024
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp6.752.192.875,-	APBD TA 2024
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp18.097.776.500,-	APBD TA 2024
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp551.815.900,-	APBD TA 2024



No.	Program	Anggaran	Keterangan
10.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.643.957.760,-	APBD TA 2024
11.	Program Kawasan Permukiman	Rp12.948.487.750,-	APBD TA 2024
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp29.731.385.430,-	APBD TA 2024
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp27.883.176.000,-	DAIS TA 2024
Jumlah Anggaran		Rp186.931.615.283,-	

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPKP 2024

Tabel 2.11.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DPUPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31 indeks Skala 0 - 100
2.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52 indeks Skala 0 - 100
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.163.241.375,-	Perubahan APBD TA 2024
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp6.290.324.295,-	Perubahan APBD TA 2024
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp10.110.000,-	Perubahan APBD TA 2024
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp13.800.430.041,-	Perubahan APBD TA 2024
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp16.706.180.364,-	Perubahan APBD TA 2024
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp32.073.314.930,-	Perubahan APBD TA 2024
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp6.344.072.925,-	Perubahan APBD TA 2024
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp32.082.589.900,-	Perubahan APBD TA 2024
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp546.842.900,-	Perubahan APBD TA 2024
10.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.749.388.260,-	Perubahan APBD TA 2024
11.	Program Kawasan Permukiman	Rp13.925.992.189,-	Perubahan APBD TA 2024
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp34.833.139.930,-	Perubahan APBD TA 2024



No.	Program	Anggaran	Keterangan
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp27.513.086.000,-	Perubahan DAIS TA 2024
14.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp402.720.000,-	Perubahan DAIS TA 2024
Jumlah Anggaran		Rp204.441.433.109,-	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja DPUPKP 2024

2.9 Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja murni sebesar Rp.186.931.615.283,00 Dengan rincian Belanja Operasi Rp.76.336.463.688,00 Belanja Modal Rp.110.595.151.595,00 Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 dan pergeseran dana keistimewaan (DAIS) Tahun 2024 menjadi Rp.204.641.433.109,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp.85.923.399.777,00 dan Belanja Modal Rp.118.718.033.332,00.

2.10 Target Belanja

Tabel 2.9.1 Target Belanja DPUPKP APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Target (%)
Belanja Operasi	Rp.85.923.399.777,00	90%
Belanja Modal	Rp.118.718.033.332,00	90%

Sumber: DPPA DPUPKP 2024

2.11 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah” dan “Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman serta Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” , sehingga seluruh anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



Tabel 2.10.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Program	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		18.163.241.375	8,88
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	18.163.241.375	100
2	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		150.448.198.319	73,23
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.290.324.295	4,20
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16.706.180.364	11,15
		Program Penataan Bangunan	32.073.314.930	21,40
		Program Penyelenggaraan Jalan	32.082.589.900	21,41
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	546.842.900	0,36
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan tata Ruang	402.720.000	0,27
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	34.833.139.930	23,24
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	26.928.086.000	17,97
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		36.614.993.415	17,89
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.110.000	0,03
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.800.430.041	37,69
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.344.072.925	17,33
		Program Pengembangan Perumahan	1.749.388.260	4,78
		Program Kawasan permukiman	14.125.992.189	38,58
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	585.000.000	1,60

Sumber: DPPA DPUPKP 2024





**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- 1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS**
- 3. ANALISIS GENDER**
- 4. ANALISIS SUMBER DAYA**
- 5. ANALISIS EFISIENSI**
- 6. INOVASI**
- 7. KOLABORASI LINTAS SEKTOR**
- 8. REALISASI ANGGARAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Intervasi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	%	90,31 Indeks	92,16	102,05%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	%	56,52 indeks	60,25	106,61%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi	%	A Nilai >80-90	A	100%



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Birokrasi oleh Inspektorat				

Sumber: Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Sasaran 1 Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah tercapai 102,05%, Sasaran 2 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman tercapai 106,61% dan Sasaran 3 Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tercapai 100,00%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam hal ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024. Secara rinci akan diuraikan dalam bahasan pada sub bab selanjutnya.

3.2.1 Sasaran Strategis (Analisa per Sasaran Strategis)

Tolak Ukur Capaian Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah berasal dari Indikator Indeks prasarana umum wilayah yang diharapkan adanya peningkatan di setiap tahunnya/dari tahun sebelumnya.
- b. Indeks prasarana umum wilayah dihitung dari pembobotan capaian kinerja pada program penyelenggaraan jalan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan SDA dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; ditambah capaian kinerja program penataan bangunan gedung; ditambah capaian kinerja pada program pengembangan jasa konstruksi; ditambah capaian kinerja pada kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan (UPT PJU)
- c. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman berasal dari Indikator Indeks prasarana perumahan dan permukiman yang diharapkan adanya peningkatan di setiap tahunnya/dari tahun sebelumnya.
- d. Indeks prasarana perumahan dan permukiman dihitung dari pembobotan rata-rata capaian kinerja pada program kawasan permukiman; capaian kinerja pada program penataan bangunan dan lingkungannya; capaian kinerja pada program



- pengembangan perumahan; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; ditambah capaian kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- e. Sedangkan sasaran pendukung Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat
 - f. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dengan formula indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2026

Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah” dengan indikator Indeks Prasarana Umum Wilayah, “Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman” dengan indikator Indeks Perumahan dan Permukiman, “Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	2024			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	90,31 indeks	92,16	102,05%	Sangat Baik	92.12 indeks	100,04%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	56,52 indeks	60,25	106,61%	Sangat Baik	58,53 indeks	102,93%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai >80-90	87,475	100,00%	Sangat Baik	A Nilai >80-90	100,00%

Sumber: Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026



3.2.3 Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2024 yang merupakan tahun kedua RPD Tahun 2023–2026 dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Perbaikan Kinerja yang juga dituangkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) terdapat beberapa penyempurnaan sasaran. Capaian Kinerja di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) relatif sama, karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.1 Pengukuran Indikator Tujuan/Sasaran dengan Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	89,11	91,04	102,16%	90,31	92,16	102,05%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	55,37	58,06	104,8%	56,52	60,25	106,61%	Sangat Baik
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai 80	AA Nilai 81,58	101,97%	A Nilai >80-90	A Nilai 87,475	100%	Sangat Baik

Sumber: Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026



3.2.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi Kinerja tahun 2024 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.4.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran					Realisasi Tahun 2024 (%)
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	89.11 Skala 1-100	90.31 Skala 1-100	91.21 Skala 1-100	92.12 Skala 1-100	92,16 (102.05%)
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	55.37 Skala 1-100	56.52 Skala 1- 100	57.53 Skala 1-100	58.53 Skala 1-100	60,25 (106.61%)
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai 70-80	A Nilai 80-90	A Nilai 80-90	A Nilai 80-90	A Nilai 87,475 (100%)

Sumber: Metadata Indikator Sasaran Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

3.2.5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Dalam dokumen perencanaan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023–2026, berkaitan kepada program yang ada dalam dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun untuk penentuan Indikator dalam Tujuan dan Sasaran, maupun Program pada Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan Indikator Indeks prasarana perumahan dan permukiman dimana penentuan indikator programnya mengacu pada indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. adapun realisasi kinerja tahun 2024 yang mengacu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:



Tabel 3.2.7 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimal

No	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	123.585 kk	123.585 kk	100 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	58,80%	55,24 %	106,06 % (ini merupakan capaian indikator negative, semakin realisasi berkurang dari target semakin baik, artinya pelayanan SPALD-S akses layak dengan berkurangnya dari target maka akan menuju ke akses aman)
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	21,05 %	23,80 %	113,07%
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,52 %	19,87 %	101,76%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100 %	100 %	100%

Sumber: Data Capaian Kinerja yang terkait SPM 2024



3.2.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun kedua Renstra 2023–2026, dengan tercapainya indikator tujuan sasaran sesuai dengan yang ditargetkan lebih dari 100% maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan sasaran infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta perumahan dan permukiman yang nyaman dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD, DAK dan Dana Keistimewaan serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kualitas infrastruktur pekerjaan umum meningkat.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun kedua Renstra 2023-2026 hampir tidak ada, program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi kegagalan:

- a. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- b. Memberi penghargaan bagi Bidang dan UPT untuk kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung



oleh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Capaian dari output kegiatan tersebut juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Karena Dinas Pekerjaan Umum mengampu 3 (tiga) urusan sehingga adapun capaian program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran yang mendukung urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon II beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.1 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31%	92,16%	102,05%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja DPUPKP Tahun 2024

Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Prasarana Wilayah dengan formula indikator = [35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100

Target:

$$= [35\% (92,25\%) + 30\% (90,51\%) + 20\% (95,90\%) + 5\% (70,83\%) + 10\% (81,45\%)] \times 100$$

$$= 90,31$$

Realisasi:

$$= [35\% (93,36\%) + 30\% (90,54\%) + 20\% (95,96\%) + 5\% (99,58\%) + 10\% (81,53\%)] \times 100$$

$$= 32.2676 + 27,162 + 19,192 + 4,979 + 8,153$$

$$= 92.162 = 92.16$$

A.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga dengan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan didukung 1 (satu) program Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator program yaitu (60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap +



10% Jembatan kondisi mantap) x 100%. sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan	Penyelenggaraan Jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	92,25%	93,36%	101%
1.1	Terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota		Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	4,7283 km	5,901 km	
			Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	4,42 km	20,188 km	
			Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	4 jembatan	4 jembatan	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Tabel 3.2.7.3 Indikator Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga

Indikator	Target	Realisasi
Jalan dalam kondisi mantap	216,19 km	220,62
Pelengkap jalan dalam kondisi mantap	175,34 km	175,34 Km
Jembatan kondisi mantap	51 Buah	45 Buah
Total panjang jalan kota	233,21 Km	233,21 Km
Total panjang pelengkap jalan	186,09 Km	186,09 Km
Total jembatan	61 Buah	54 Buah

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan

Rumus: (60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%

$$= \left[\left(60\% \times \frac{220,62}{233,21} \right) + \left(30\% \times \frac{175,34}{186,09} \right) + \left(10\% \times \frac{45}{54} \right) \right] = 93,36\%$$

Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.4 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan secara berkala	4,7283 Km	5,901 Km
2	Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan secara Rutin	4,42 Km	20,188 km
3	Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilakukan secara rutin	4 jembatan	4 jembatan

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Jembatan/Bina Marga dengan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan juga didukung oleh kegiatan yang didukung oleh dana keistimewaan (DAIS) dari DIY untuk pekerjaan pedestrian insidentil Jl. Suroto.



Tabel 3.2.7.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan	Penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	92,25%	93,36%	101%
1.1	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang		Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100 %	100 %	100 %
1.2	Melaksanakan pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan pemeliharaan jalan secara berkala, yang meliputi pekerjaan:
 - a. Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongkuning (sisi selatan).
 - b. Pemeliharaan Berkala Jalan I Dewa Nyoman Oka Cs.
 - c. Pemeliharaan Berkala Jalan Bantul.
 - d. Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Balaikota.
 - e. Pemeliharaan Berkala Jalan Ngeksigondo.
 - f. Penyusunan leger jalan.
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan yang didukung oleh pekerjaan:
 - a. Pemeliharaan Jalan Insidentil di sepanjang jalan kawasan Kota Yogyakarta .
 - b. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pelengkap jalan secara swakelola.
3. Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan yang didukung oleh pekerjaan:



- a. Pemeliharaan Jembatan Insidentil di kawasan Kota Yogyakarta.
- b. Pekerjaan pemeliharaan jembatan secara swakelola.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.32.082.589.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp.29.880.447.165,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **93,13%**. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa **masalah** yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan lahan rumija untuk bangunan pelengkap jalan dan fasilitasnya yang sesuai dengan standar (trotoar sempit) di semua ruas jalan.
- b. Alih fungsi trotoar menjadi PKL dan tempat parkir
- c. Terdapat pekerjaan yang kurang sinkron dengan agenda pekerjaan instansi pemerintah maupun badan usaha.
- d. Cuaca yang kurang mendukung sehingga pekerjaan hampar aspal dan pekerjaan fisik lapangan terhambat tapi dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak.
- e. Banyaknya kerusakan pada pedestrian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti ballard rusak, street furniture mengalami vandalisme.

Upaya **penyelesaian** yang dilakukan yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk penataan utilitas diatas trotoar.
- b. Berkoordinasi dengan wilayah dan Satpol PP untuk mengembalikan fungsi trotoar.
- c. Sinkronisasi agenda pekerjaan tiap instansi, baik antar instansi pemerintah maupun badan usaha daerah diselesaikan dengan melakukan koordinasi intensif pembahasan tatakala grand design pekerjaan masing-masing instansi.
- d. Melakukan koordinasi internal agar pekerjaan fisik dapat terselesaikan sesuai dengan tata kala.
- e. Koordinasi dengan Satpol PP untuk pengendalian risiko tingkat kerusakan pada pedestrian





Gambar 3.2.7.1 Pemeliharaan Jalan Gedongkuning sisi selatan
Sumber: DPUPKP 2024



Gambar 3.2.7.2 Pemeliharaan Insidental Jalan Winong
Sumber: DPUPKP 2024



Gambar 3.2.7.3 Pemeliharaan Insidental Jembatan Jalan Sudirman
Sumber: DPUPKP 2024



Gambar 3.2.7.4 Sosialisasi Gangguan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Melalui Media Sosial
Sumber: DPUPKP 2024



A.2 Capaian Kinerja Pengelolaan SDA dan Sistem Drainase

Capaian kinerja dengan indikator persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud didukung 2 (dua) program yaitu:

A.2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan indikator program persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas saluran pengairan	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,63%	92,63%	100%
1.1	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,44km	0,44km	
1.2	Melaksanakan rehabilitasi tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,4km	0,4km	
1.3	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5km	0,5km	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.7 Indikator Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator	Target	Realisasi
Panjang talud kondisi baik (baik pembangunan baru dan rehab talud)	54.124,74m	54.081,14m
Panjang saluran irigasi kondisi baik	8.379,01m	8.379,01m
Total panjang talud	54.779,33m	54.735,73m
Total panjang saluran irigasi	12.696,62m	12.696,62m

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026



Indikator Kinerja Program: Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik

Rumus: (Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%

$$= \frac{54.081,14+8.379,01}{54.735,73+12.696,62} \times 100\% = 92,63\%$$

Tabel 3.2.7.7 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul Sungai dan Tebing Sungai Yang Dipelihara	0,44 Km	0,44 Km	100%
2	Melaksanakan rehabilitasi tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Direhabilitasi	0,4 Km	0,4 Km	100%
3	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0,5 km	0,5 km	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja (program) Persentase Kualitas Talud dan Saluran Irigasi Kondisi Baik memiliki target 92,63% dengan realisasi sebesar 92,63% sehingga tingkat capaian yang dihasilkan sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai yang meliputi pekerjaan pemeliharaan talud tersebar (insidental) di kawasan Kota Yogyakarta
2. Melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai yang meliputi pekerjaan:
 - a. Rehabilitasi Talud Sungai Code Kel. Terban
 - b. Rehabilitasi Talud sungai Gajah Wong Kel. Giwangan
 - c. Rehabilitasi Talud Sungai Gajah Wong Kel. Muja-muju RW 08
 - d. Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Tersebar
3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan yang meliputi pekerjaan:



- a. Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidental) Pemeliharaan Saluran Gg Kamboja
- b. Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidental) Pemeliharaan Saluran Batikan
- c. Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tersebar (Insidental) Pemeliharaan Saluran Kelurahan Rejowinangun

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.6.290.324.295,00** dengan realisasi sebesar **Rp.5.941.549.413,00** dengan tingkat realisasi keuangan sebesar **94.45%**. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu akses material dan alat berat ke lokasi pekerjaan sulit. Upaya Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan membuat akses alat berat sementara/baru dan perubahan metode kerja dengan distribusi secara bergantian.



Gambar 3.2.7.5 Pekerjaan Rehabilitasi Talud Sungai Gajah Wong Kel. Giwangan

Sumber: DPUPKP 2024

A.2.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator program Persentase pemenuhan drainase kondisi baik sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.2.7.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pemenuhan drainase ramah lingkungan di Kota Yogyakarta	Pengelola dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,40	88,44	100,05%
1.1	Melaksanakan pembangunan saluran drainase perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem drainase perkotaan	3 Sistem drainase perkotaan	
1.2	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem drainase perkotaan	3 Sistem drainase perkotaan	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.9 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator	Target	Realisasi
Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) (meter)	307.566,55m	308.909,34m
Total panjang saluran drainase (meter)	347.937,35m	349.280,14m

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan**Rumus:** (Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100%

$$= \frac{308.909,34}{349.280,14} \times 100\% = \mathbf{88,44\%}$$

Tabel 3.2.7.10 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan pembangunan saluran drainase perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem drainase perkotaan	3 Sistem drainase perkotaan



No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
2	Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem drainase perkotaan	3 Sistem drainase perkotaan

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja (program) Persentase Pemenuhan Drainase Ramah Lingkungan memiliki target 88,40% dengan realisasi sebesar 88,44% sehingga tingkat capaian yang dihasilkan sebesar 100,05%.

Dalam rangka mencapai Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung oleh 2 sasaran kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan pembangunan saluran drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
 - a. Pembangunan SAH Jl. Abimanyu, Jl. Permadi, Jl. Sugriwo dan Jl. Sadewa
 - b. Pembangunan SAH Jl. Kyai Mojo
 - c. Pembangunan SAH Kampung Kranon Kel. Sorosutan
 - d. Pembangunan SAH Kel. Giwangan RW. 13
 - e. Pembangunan SAH Kel. Sorosutan (TMMD)
 - f. Pembangunan Gorong-gorong Tersebar
 - g. Pembangunan SAH JL. Imogiri Timur Kel. Giwangan
 - h. Pembangunan SAH Jl. Pembayun
 - i. Pembangunan SAH Jl. Pugeran Timur
 - j. Pembangunan SAH Jl. Widayati Sutarjo Kel. Baciro
 - k. Pembangunan SAH Kel. Suryodiningratan
 - l. Pembangunan SAH RW 5 Kel. Terban
 - m. Pembangunan SAH RW 9, 10 Kel. Prenggan
 - n. Pembangunan SAH Timur PIH
2. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
 - a. Pemeliharaan Saluran Air Hujan Tersebar (Insidentil)
 - b. Pemeliharaan SAH Cokrodiningratan
 - c. Pemeliharaan SAH Panembahan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.16.706.180.364,00** dengan realisasi sebesar



Rp.16.174.514.750,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar **96,82%**. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Adanya infrastruktur bawah tanah seperti jaringan telekomunikasi, saluran limbah, jaringan air bersih, dan irigasi.
2. Proses konstruksi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga di sekitar lokasi pekerjaan SAH.

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pendampingan di saat pekerjaan konstruksi oleh pemilik infrastruktur bawah tanah.
2. Koordinasi dengan satlantas terkait proses konstruksi yang dimungkinkan mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga serta dilakukan juga penyesuaian waktu (dikerjakan malam hari) pengerjaan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.



Gambar 3.2.7.6 Pekerjaan SAH Kelurahan Giwangan RW 13



Gambar 3.2.7.7 Pekerjaan SPAH terintegrasi SAH di Panembahan Kraton



A.3 Capaian Kinerja Penataan Bangunan Gedung

Capaian kinerja Penataan Bangunan Gedung dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik pada bidang Penataan Bangunan Gedung dan Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF yang diampu oleh bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.11 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan Gedung

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91,79%	91,92%	100,14%
1.1	Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24 Bangunan Gedung	24 Bangunan Gedung	
1.2	Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	
2.	Meningkatnya layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu	Penataan Bangunan Gedung	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%	100%	100%
2.1	Melaksanakan penerbitan		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan	12 dokumen	12 dokumen	



No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.12 Indikator Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	984 Unit	1001 Unit
Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	1072 Unit	1089 Unit

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator kinerja program: persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

Rumus: (jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/ Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%

$$= \frac{1001}{1089} \times 100\% = 91,92\%$$

Tabel 3.2.7.13 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	11 dokumen	11 dokumen



No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
2	Melaksanakan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24 unit	24 unit

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.14 Indikator Persentase Pelaksanaan Konsultasi Permohonan PBG dan SLF

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	984 Unit	1001 Unit
Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	1072 Unit	1089 Unit

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan

Rumus: Bangunan Gedung (PBG) = (Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%

$$= \frac{1299}{1299} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.2.7.15 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Persentase Pelaksanaan Konsultasi Permohonan PBG dan SLF

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	12 dokumen	12 dokumen	100 %



No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
		Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Capaian Kinerja Penataan Bangunan Gedung dengan indikator persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik didukung oleh kegiatan yang didukung oleh Dana Keistimewaan (DAIS) dari DIY untuk urusan kebudayaan berupa Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan tahap II.

Tabel 3.2.7.16 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	100%	100%
	Melaksanakan Pengelolaan Taman Budaya		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	1 objek	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.17 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan DIY

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	1 objek	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik memiliki target **91,79%** dengan realisasi sebesar **91,92%** sehingga tingkat capaian yang



dihasilkan sebesar **100,14%**. Adapun indikator kinerja yang kedua adalah Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF yang memiliki target **100%** dengan realisasi **100%**. (diampu Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi). Dalam rangka mencapai Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis

Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:

- a. Pembangunan Kantor Kelurahan Bausasran
- b. Pembangunan Kantor Kelurahan Klitren
- c. Pembangunan Kantor Kelurahan Suryatmajan
- d. Pembangunan Kantor Kelurahan Tahunan
- e. Renovasi Bangunan Gedung Arpusda
- f. Renovasi Gedung Eks Kantor UPT PPA
- g. Renovasi Bangunan Gedung Eks Kantor Kemantren Gondomanan
- h. Renovasi Bangunan Gedung Korpri
- i. Renovasi Bangunan Gedung Satpol PP
- j. Renovasi Instalasi Air Kotor Puskesmas Gondomanan
- k. Pembangunan SMP Negeri 10
- l. Renovasi SMP Negeri 14
- m. Renovasi TK Negeri 6
- n. Renovasi TK Negeri 11
- o. Pembangunan SD Negeri Jetis 1
- p. Pembangunan SD Negeri Widoro
- q. Renovasi Mushola SD Negeri Pandeyan
- r. Renovasi SD Negeri Suryodiningratan I
- s. Rehabilitasi Atap Lapangan Tenis Rumah Dinas Walikota
- t. Pembangunan Pasar Kluwih
- u. Rehabilitasi Gedung Rusunawa Cokrodirjan
- v. Renovasi Pagar Terminal Wisata Giwangan

2. Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi pekerjaan:

- a. Penyusunan DED Penyusunan DED Gedung Serbaguna Wirobrajan
- b. Penyusunan DED Gedung Unit I Komplek Balaikota
- c. Penyusunan DED Pengembangan TK Negeri 4



- d. Penyusunan DED Balai RW 04 Prenggan
 - e. Penyusunan DED Gudang Logistik dan Peralatan BPBD
 - f. Penyusunan DED Renovasi Gedung Rekso Arcade
 - g. Penyusunan Review DED Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - h. Penyusunan Review DED Jembatan Penghubung dan Landscape
 - i. Penyusunan Review Masterplan Komplek Balaikota
 - j. Pemeriksaan Keandalan Bangunan Bidang Pemerintahan
 - k. Pemeriksaan Keandalan Bangunan Bidang Pendidikan
3. Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan Gedung yang didukung dengan belanja tenaga ahli terkait konstruksi diampu oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Program Penataan Bangunan Gedung memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.32.073.314.930,00** dengan realisasi sebesar **Rp.30.623.548.057,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **95,48%**. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Pekerjaan mundur melebihi tatakala yang sudah tertuang pada kontrak pekerjaan. Karena kurang kompetennya pihak penyedia jasa konstruksi, terdapat beberapa masalah dalam proses pembangunan seperti ketersediaan sumber daya penyedia yang kurang, manajemen penyedia yang tidak baik.
2. Banyaknya antrian proses verifikasi pengajuan PBG di TPA (Tim Profesi Ahli) dan TPT (Tim Penilai Teknis).

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pendampingan di saat pekerjaan konstruksi oleh pemilik infrastruktur bawah tanah.
2. Koordinasi dengan satlantas terkait proses konstruksi yang dimungkinkan mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga serta dilakukan juga penyesuaian waktu (dikerjakan malam hari) pengerjaan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.





Gambar 3.2.7.8 Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II



Gambar 3.2.7.9 Pembangunan SMP Negeri 10



Gambar 3.2.7.10 Pelayanan Konsultasi Teknis PBG SLF





Gambar 3.2.7.11 Proses Cek Lokasi Pemohon PBG SLF



Gambar 3.2.7.12 Sosialisasi PBG SLF ke Masyarakat



A.4 Capaian Kinerja Pengembangan Jasa Konstruksi

Capaian Kinerja Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi di dukung program Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator program ((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun / Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 2 x 100%. sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.18 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan Gedung

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	70,83%	99,58%	140,59%
1.1	Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 orang	122 orang	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	120 orang	122 orang	



No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Difasilitasi Sertifikasi			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga	10 lembaga	
1.2	Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.19 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Tersertifikasi

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi	80	122
Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun	150	195
Jumlah target peserta pelatihan jasa konstruksi	120	120
Jumlah target peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun	200	200

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program : Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

Rumus: $\left(\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi}}{\text{Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun}}{\text{Jumlah}} \right)$



peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 2 x 100%.

$$= \left[\left(\frac{122}{120} \right) + \left(\frac{195}{200} \right) \right] / 2 \times 100\% = 99,58\%$$

Dalam rangka mencapai target Program Pengembangan Jasa Konstruksi dukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.20 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 orang	122 orang
2	Melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 orang	122 orang
3	Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga
4	Melaksanakan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen
5	Melaksanakan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja (program) Persentase Pemenuhan Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi memiliki target



70,83% dengan realisasi sebesar **99,58%** sehingga tingkat capaian yang dihasilkan sebesar **140,59%**.

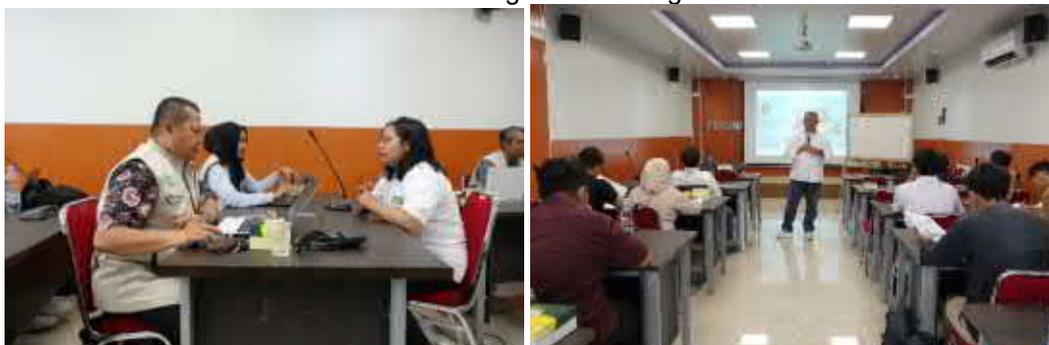
Dalam rangka mencapai target Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung oleh 2 sasaran kegiatan yaitu:

- a. Melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
- b. Melaksanakan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan melaksanakan penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.546.842.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp.500.876.145,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **91,59%**. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat permasalahan terkait kurangnya masyarakat di kota Yogyakarta yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi oleh karena itu di tahun 2024 ini pelatihan dan uji sertifikasi difokuskan ke jabatan kerja jenjang 5, sehingga dapat memaksimalkan peserta pelatihan dan uji sertifikasi yang berasal dari lulusan baru perguruan tinggi di kota Yogyakarta dan sekitarnya.



Gambar 3.2.7.13 Kegiatan Bimbingan Teknis



Gambar 3.2.7.14 Kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi



A.5 Capaian Kinerja Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan

Capaian Kinerja Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan dengan indikator Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan dengan formula indikator (Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 % di dukung program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.21 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pogram	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas perlengkapan jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	81,45 %	81,53 %	100,1 %
1.1	Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terrehabilitasi dan terpelihara	1.310 unit	1.594 unit	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.22 Indikator Pemenuhan Pelatihan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Tersertifikasi

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah PJU ramah lingkungan	24.004 titik	24.027 titik
Jumlah titik PJU	29.470 titik	29.470 titik

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan

Rumus: (Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %

$$= \frac{24027}{29470} \times 100\% = 81,53\%$$



Dalam rangka mencapai target Program didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.23 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1.310 unit	1.594 unit

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) didukung oleh satu sasaran kegiatan yaitu Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang didukung oleh satu sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu:

- a. Pemeliharaan Insidentil PJU, Panel Jaringan, Panel Kwh dan Lampu hias
- b. Penataan Penerangan Jalan Kota - Jl. Letjen. S. Parman, Jl. Sugeng Jeroni
- c. Penataan Penerangan Jalan Kota - Jl. RE Martadinata, Jl. HOS Cokroaminoto
- d. Penataan Penerangan Jalan Kota - Kawasan Kotabaru
- e. Penataan Penerangan Jalan Kota - Kawasan Pasar Kotagede
- f. Penataan Penerangan Jalan Kota - Tegalturi Tegalendu
- g. Penataan PJU Lingkungan
- h. Penataan PJU Lingkungan Kampung
- i. Penataan PJU Terminal Giwangan

Pelaksanaan pekerjaan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.34.833.139.930,00** dengan realisasi sebesar **Rp.33.480.806.466,00** dengan tingkat realisasi keuangan sebesar **96,11%**. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti:

- a. Proses pengadaan di BPBJ mengalami kemunduran secara tatakala.
- b. Terdapat pekerjaan yang selesai tidak tepat waktu sesuai kontrak.
- c. Penataan Penerangan Jalan Kota-kawasan Kotabaru mengalami addendum terkait perubahan titik lokasi pekerjaan.

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan waktu pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu.



- b. Melakukan koordinasi intensif dengan penyedia.
- c. Berkoordinasi dengan pihak eksternal (perencana dan penyedia) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Gambar 3.2.7.15 Perbaikan lampu lampu hias Jl. Cik Di Tiro



Gambar 3.2.7.16 Perbaikan PJU Jl. Tukangan



B. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran yang mendukung urusan perumahan yaitu Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon II beserta realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.24 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52 indeks	60,25 indeks	106,61 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2024

Sasaran II

Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman dengan formula indikator [50% Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100

Target

$$= 50\% \times \frac{34,68\%+94,98\%+90,00}{3} + 45\% \times 33,13\% + 5\% \times 100\%$$

$$= 56,25\%$$

Realisasi

$$= 50\% \times \frac{50,17\%+96,17\%+96,14\%}{3} + 45\% \times 32,97\% + 5\% \times 100\%$$

$$= 40,41 + 14,84 + 5$$

$$= 60,25\%$$

B.1 Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman didukung 1 (satu) program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja program Persentase Permukiman Kumuh Yang Tertangani sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.2.7.25 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Kawasan Permukiman

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penanganan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	34,68%	50,71 %	144,70 %
1.1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,6 Ha	0,6 Ha	100%
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95 Unit Rumah	115 Unit	121,05%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.26 Indikator Permukiman Kumuh Yang Tertangani

Indikator	Target	Realisasi
Luas kawasan kumuh yang tertangani	39,78 ha	57,56 ha
Luas total kawasan kumuh	114,72 ha	114,72 ha

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase permukiman kumuh yang tertangani

Rumus: (Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%

$$= \frac{20,54+4,82+8,42+23,80}{114,72} \times 100\% = 50,17\%$$

Tabel 3.2.7.27 Data Penanganan kumuh kota Yogyakarta tahun 2021–2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pengurangan kumuh (dalam hektar)	20,52	4,82	8,42	23,80

Sumber: DPUPKP 2024

Dalam rangka mencapai target Program Kawasan Permukiman didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:



Tabel 3.2.7.28 Sasaran Sub Kegiatan dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,6 Ha	0,6 Ha
2	Melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	95 Unit Rumah	115 Unit

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Capaian Kinerja Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase permukiman kumuh yang tertangani juga didukung oleh kegiatan yang didukung oleh Dana Keistimewaan (DAIS) dari DIY untuk urusan Kebudayaan berupa Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta.

Tabel 3.2.7.29 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang DiBiayai Dana Keistimewaan DIY

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	100%	100%
	Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.30 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Yang di biayai Dana Keistimewaan DIY

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit	9 Unit	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja (program) yaitu Persentase Permukiman Kumuh yang Tertangani memiliki target **34,68%** dengan realisasi sebesar **50,71%** sehingga tingkat capaiannya mencapai **144,70%**.

Dalam rangka mencapai target Program Kawasan Permukiman didukung oleh satu sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang didukung pula oleh dua sasaran sub kegiatan, yaitu:

- a. Melaksanakan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi pekerjaan:
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Insidentil, Pemeliharaan Talud Permukiman Insidentil, dan Land clearing (Pembersihan lahan).
- b. Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang meliputi pekerjaan:
 1. Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban (DAK)
 2. Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban
 3. Penataan Landscape dan Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban
 4. Rehab Rumah terdampak Konsolidasi Lahan Pringgokusuman
 5. Peningkatan Kualitas RTLH
 6. Peningkatan Kualitas RTLH TMMD
 7. Rehab Rumah terdampak

Dalam rangka mencapai target, Program Kawasan Permukiman memiliki pagu **Rp14.125.992.180,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp14.071.729.492,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **99,61%**. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu kesiapan masyarakat dalam hal waktu pelaksanaan untuk ditata rumah/lingkungannya sehingga upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan bagi masyarakat yang akan ditata rumah/lingkungannya.



Gambar 3.2.7.17 Pembangunan Rumah Terdampak Konsolidasi Lahan Terban





Gambar 3.2.7.18 Peningkatan Kualitas RTLH TMMD



Gambar 3.2.7.19 Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta.



B.2 Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya didukung 1 (satu) program yaitu Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator program Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.31 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,98%	96,17%	101,25 %
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	3 Kawasan	100%
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Tabel 3.2.7.32 Indikator Program Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Indikator	Target	Realisasi
Luas kawasan dengan sarana prasarana baik	1411,06 ha	1434,86 ha
Total luas kawasan permukiman	1492 ha	1492 ha

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik.

Rumus: (Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %

$$= \frac{1434,86}{1492} \times 100\% = 96,17\%$$

Dalam rangka mencapai target Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.33 Sasaran Sub Kegiatan dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Penataan Bangunan dan Lingkungannya

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	3 Kawasan	100 %
2	Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %



No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
	Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator kinerja (program) yaitu Persentase Kawasan Permukiman dengan Sarana dan Prasarana Dasar yang Baik memiliki target **94,98%** dengan realisasi sebesar **96,17%** sehingga tingkat realisasinya sebesar **101,25%**.

Dalam rangka mencapai targetnya, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya didukung oleh satu sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung pula oleh dua sasaran sub kegiatan, yaitu:

- a. Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya , meliputi pekerjaan:
 - 1. Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Terban RT.002 RW. 001 (DAK+APBD)
 - 2. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Prenggan RW. 001
 - 3. Pembangunan Talud Permukiman Kelurahan Kricak RW. 01
- b. Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:
 - 1. Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman tersebar
 - 2. Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Kotabaru
 - 3. Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Pringgokusuman RW.003
 - 4. Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan Bener RT.25 RW.04
 - 5. Kajian Konsolidasi Lahan Kel. Prawirodirjan
 - 6. Kajian Penggunaan Tanah-tanah Kasultanan untuk Perumahan Permukiman



Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki pagu **Rp6.344.072.925,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp6.276.635.858,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **98,93%**. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yaitu keterbatasan lahan dalam memenuhi fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Hunian yang layak sehingga dilakukan konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan yang dilakukan merupakan bentuk penanganan kumuh melalui pola peremajaan atau pembongkaran dan penataan secara menyeluruh, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kumuh bukan hanya untuk lapis satu rumah di bantaran sungai tetapi bisa menangani lapis dua atau lapis tiga rumah dari bantaran sungai.



Gambar 3.2.7.20 Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Terban RT.002 RW. 001 (DAK+APBD)



Gambar 3.2.7.21 Pembangunan Talud Permukiman Kelurahan Kricak RW. 01



B.3 Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan

Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan 2 indikator kinerja program, yaitu Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program dan Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.34 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pengembangan perumahan	Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	80,00%	92,27 %	115,34 %
2.	Meningkatnya penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%	100%	100%
2.1	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.2	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.35 Indikator Persentase Tercapainya Target Retribusi Sewa Rusun

Indikator	Target	Realisasi
Realisasi retribusi sewa rusun	Rp956.928.000	Rp1.103.718.650
Target pendapatan tahun berjalan	Rp1.196.160.000	Rp1.196.160.000

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026



Indikator Kinerja Program: Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun

Rumus: (Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%

$$= \frac{1.103.718.650}{1.196.160.000} \times 100\% = 92,27\%$$

Tabel 3.2.7.35 Indikator Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana Dan Relokasi Program

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%	100%
Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program	100%	100%

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program

Rumus: (Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%

Dikarenakan pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dan belum adanya kebijakan terkait relokasi program pemerintah, sehingga capaian Persentase Penanganan rumah korban bencana dan relokasi program menjadi 100%.

Dalam rangka mencapai target Program Pengembangan Perumahan didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.36
Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024
Indikator Pengembangan Perumahan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2	Melaksanakan penyusunan dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Program Pengembangan Perumahan dengan dua indikator kinerja (program) yaitu Persentase Tercapainya Target Retribusi Sewa Rusun memiliki target **80,00%** dengan realisasi sebesar **92,27%** sehingga tingkat capaian yang dihasilkan sebesar **115,34%** dan Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program memiliki target **100%** dengan realisasi sebesar **100%**.

Program Pengembangan Perumahan didukung oleh dua sasaran kegiatan yaitu:

- a. Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum yang meliputi pekerjaan :
 1. Pemeliharaan Bangunan Rusun Cokrodirjan;
 2. Pemeliharaan Bangunan Rusun Grha Bina Harapan;
 3. Pemeliharaan Bangunan Rusun MBR Bener Tower I dan Tower II;
 4. Renovasi Kantor UPT. Pengelolaan Rusunawa; dan
 5. Pembangunan Pos Jaga Rusun MBR Bener
- b. Melaksanakan penyusunan dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota dengan melaksanakan Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana di Kawasan Sungai Gajah Wong.

Dalam pelaksanaannya, Program Pengembangan Perumahan memiliki pagu anggaran sebesar **Rp1.749.388.260,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp1.724.338.036,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **98,56%**. Untuk mencapai realisasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Penyelesaian piutang bagi penghuni yang sudah tidak terlacak datanya, yang telah diupayakan untuk mencari alamat penghuni yang masih memiliki piutang, serta berkoordinasi dengan BPKAD untuk penghapusan piutang.
2. Tidak adanya lahan serta adanya resistensi dari masyarakat untuk dilakukan relokasi. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiasatinya dengan melakukan intervensi teknologi misalnya seperti pembangunan talud/tanggul untuk lokasi yang rawan bencana namun tidak dapat dilakukan relokasi.





Gambar 3.2.7.22 Pemeliharaan Bangunan Rusun Cokrodirjan



Gambar 3.2.7.23 Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana di Kawasan Sungai Gajah Wong



B.4 Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan 3 (tiga) indikator yaitu persentase pelayanan SPALD-S akses layak, persentase pelayanan SPALD-S akses aman, dan persentase pelayanan SPALD-T akses aman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.37 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	58,80%	55,24 %	106,06 %
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	21,05%	23,80 %	113,07 %
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,52%	19,87 %	101,76%
1.1	Melaksanakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	145 M3/Hari	145 M3/Hari	100%
1.2	Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	107 Unit	120 Unit	112,15%
1.3	Melaksanakan Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	9 Unit	9 Unit	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Pada indikator kinerja Persentase pelayanan SPALD-S akses layak, realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan berkurangnya unit SPALD-S akses layak, yang berarti terdapat peningkatan dari akses layak menjadi aman. Dengan demikian, realisasi yang lebih rendah dari yang ditargetkan untuk indikator tersebut adalah *baik* sehingga capaiannya dapat melampaui 100%.

Tabel 3.2.7.38 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-S Akses Layak

Indikator	Target	Realisasi
Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak (KK)	67.003	60.861
Jamban Bersama Layak (KK)	4.996	4.996
MCK Komunal (KK)	1.604	1.604
Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	655	811
Jumlah total KK	126.279	123.585

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase pelayanan SPALD-S akses layak

Rumus: (Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100%

$$= \frac{60.861+4.996+1.604+811}{123.585} \times 100\% = 55,24\%$$

Tabel 3.2.7.39 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-S Akses Aman

Indikator	Target	Realisasi
Jamban keluarga dengan tangki septik aman (KK)	26.580	29.413
Jumlah total KK	126.279	123.585

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase pelayanan SPALD-S akses aman

Rumus: (Jamban keluarga dengan tangki septik aman) / Jumlah total KK x 100%

$$= \frac{29.413}{123.585} \times 100\% = 23,80\%$$

Tabel 3.2.7.40 Indikator Persentase Pelayanan SPALD-T Akses Aman

Indikator	Target	Realisasi
Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi (KK)	20.381	20.181
IPAL Komunal (KK)	4.247	4.373
Jumlah Total KK	126.279	123.585

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Indikator Kinerja Program: Persentase pelayanan SPALD-T akses aman



Rumus: (Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%

$$= \frac{20.181+4.373}{123.585} \times 100\% = \mathbf{19,87\%}$$

Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.41 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi
1	Melaksanakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	145 M3/Hari	145 M3/Hari
2.	Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	107 SR	120 SR
3	Melaksanakan Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	9 unit	9 unit

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh tiga sasaran kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan :
 - a. Pembangunan IPAL Komunal Pringgokusuman;
 - b. Pembangunan IPAL Komunal Kranon Kel. Sorosutan;
 - c. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Jl. Lembu Andini Kel. Pakuncen;
 - d. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Tahunan; dan



- e. Pembangunan Tangki Septik Komunal Kel. Terban RT 02 RW 01 (DAK + APBD)
2. Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil;
3. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi:
 - a. Pemeliharaan SAL Sektor I;
 - b. Pemeliharaan SAL Sektor II;
 - c. Pemeliharaan SAL Sektor III;
 - d. Perbaikan SAL Bumijo;
 - e. Perbaikan SAL Cokrodiningratan;
 - f. Perbaikan IPAL Komunal; dan
 - g. Pekerjaan Pemeliharaan SAL Insidentil yang tersebar di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki pagu anggaran sebesar **Rp13.800.430.041,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp13.648.320.129,00** dengan tingkat capaian keuangan sebesar **98,89%**. Untuk mencapai realisasi tersebut, terdapat permasalahan terkait adanya calon penerima manfaat yang mengundurkan diri (tidak jadi dipasang Sambungan Rumah (SR)) nya sehingga harus mencari calon penerima manfaat yang baru yang mengakibatkan perlunya penyesuaian kembali perhitungan kebutuhan volume material (penyesuaian anggaran) dan perhitungan target Sambungan Rumah yang terbangun.



Gambar 3.2.7.24 Pembangunan IPAL Komunal Pringgokusuman





Gambar 3.2.7.25 Pembangunan Sambungan Rumah dan Sambungan Pembawa Kelurahan Tahunan



Gambar 3.2.7.26 Pembangunan Sambungan Rumah dan Sambungan Pembawa Kelurahan Pakuncen



Gambar 3.2.7.27 Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Pingit)



B.5 Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

Capaian Kinerja Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan indikator yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III beserta Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.42 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan air minum PDAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.43 Indikator Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

Indikator	Target	Realisasi
Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui	126.279	123.585
Total Rumah Tangga SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	126.279	123.585

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026



Indikator Kinerja Program: Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan

Rumus: (Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%

$$= \frac{123.585}{123.585} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.2.7.44 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Indikator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



Gambar 3.2.7.28 Workshop Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Yogyakarta



C. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, yang merupakan Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat, dengan target nilai A (lebih dari 80-90). Sasaran ini juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Realisasinya pada tahun 2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7.45 Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (lebih dari 80-90)	A 87,475	100,00%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2024

Sasaran 3

Sasaran:

Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Sasaran:

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Metodologi:

Penilaian RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Note: PermenpanRB No. 26 Tahun 2020 sudah dicabut dengan PermenpanRB Nomor 9 Tahun 2023, tetapi OPD tidak mengacu pada PermenpanRB Nomor 9 karena tidak mengamanatkan RB level OPD sehingga disempurnakan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta No. 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Target: A Nilai > 80-90

Realisasi: A Nilai 87,475 dengan persentase capaian 100,00%

C.1 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperoleh dari indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan capaian dari yang dihasilkan dari sub kegiatan dalam program tersebut.

Tabel 3.2.7.46 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Realisasi Tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai	A Nilai	100 %
1.1	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100 %
1.2	Terlaksananya administrasi keuangan DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang /bulan	98 Orang /bulan	100 %
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.3	Terlaksananya administrasi umum DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100 %
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan	142 Laporan	100 %
1.4	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137 Unit	137 Unit	100 %
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100 %
1.5	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100 %
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100 %
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.6	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100 %
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	86 Unit	86 Unit	100 %
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100 %



No	Sasaran Program/Kegiatan	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	149 Unit	100 %
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024

Tabel 3.2.7.46 Indikator Kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator	Target	Realisasi
Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A	A

Sumber: Metadata Indikator Program Perangkat Daerah DPUPKP 2023-2026

Dalam rangka mencapai target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 3.2.7.47 Sasaran Program Sub Kegiatan & Realisasi Tahun 2024 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
		Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100 %
2.	Melaksanakan administrasi keuangan DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang /bulan	98 Orang /bulan	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %
3.	Melaksanakan administrasi umum DPUPKP dengan lengkap	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 paket	8 paket	100 %



No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
	dan sesuai tatakala	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan	142 Laporan	100 %
4.	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137 Unit	137 Unit	100 %
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100 %
5.	Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100 %



No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian
			Kantor yang Disediakan			
6.	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	86 Unit	86 Unit	100 %
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100 %
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	149 Unit	100 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100 %

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2024



3.2.9 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Adapun tabel Analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.9.1 Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab 178 sebanyak orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 98 orang.	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Sumber Dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan infrastruktur kota	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan infrastruktur kota walaupun belum semua titik dapat tertangani dengan alasan membutuhkan biaya yang besar	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.	Mengajukan usulan anggaran ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun Dana Keistimewaan (Danais)
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Sarana Prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum dapat dipergunakan secara bersama untuk menjangkau infrastruktur di semua wilayah.	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar terjangkau ke seluruh wilayah kota Yogyakarta	Mengajukan/usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional

Untuk mencapai Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat, serta sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- a. Sumber Daya Manusia yang kompeten
- b. Sumber Dana yang mencukupi
- c. Sarana dan Prasarana yang memadai



3.2.10 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Realisasi Pendapatan

Tabel 3.2.10.1
Realisasi Pendapatan DPUPKP 2024

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Retribusi Jasa Umum	Rp1.459.176.000,00	Rp1.953.613.150,00	134
Retribusi Jasa Usaha	Rp1.280.411.000,00	Rp1.405.682.850,00	110
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp1.500.000.000,00	Rp1.930.555.850,00	129
Jumlah	Rp4.239.587.000,00	Rp5.289.851.850,00	125

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPUPKP 2024



A.1 Analisis Pencapaian Target

Pendapatan terdiri dari:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum yang melebihi target

Retribusi Jasa Umum yang merupakan retribusi pengolahan limbah cair dengan target Rp. 1.459.176.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.953.613.150,00 atau tercapai 134%. Adapun tercapainya target dikarenakan sebagai berikut:

1. Petugas Telah memberikan pelayanan yang baik.
2. Sebagian besar Hotel dan restoran lancar membayar retribusi.
3. Monitoring Evaluasi terkait retribusi secara intensif dan terjadwal.
4. Dilaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkala.

b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang melebihi target

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (sewa mobil toilet) dan Retribusi Rusunawa telah tercapai melebihi dari target. Dengan target Rp. 1.280.411.00,00 terealisasi sebesar Rp. 1.405.682.850,00 atau tercapai 110% Adapun tercapainya target dikarenakan sebagai berikut:

1. Banyaknya permintaan sewa untuk event-event acara yang membutuhkan pemakaian toilet.
2. Monitoring Evaluasi terkait retribusi secara intensif dan terjadwal.
3. Adanya hasil updating retribusi.
4. Dilaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkala.
5. Penambahan sarana prasarana.
6. Sebagian besar penghuni Rusun membayar sewa setiap bulan dengan tepat waktu.
7. Piutang penghuni sudah terbayar.
8. Aktifnya pengelola dalam penagihan.
9. Komunikasi yg efektif antara pengelola dengan penghuni.

c. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu yang melebihi target

Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan retribusi pengolahan limbah cair dengan target Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.930.555.850,00 atau tercapai 129%. Adapun tercapainya target dikarenakan sebagai berikut:

1. Banyaknya terbitnya izin untuk bangunan-bangunan gedung yang besar sehingga nilai ijin PBG/SLF juga besar contohnya seperti Hotel, dan bangunan usaha lain.



A.2 Realisasi Belanja

Tabel 3.2.10.2 Realisasi Belanja DPUPKP 2024

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Daerah	Rp204.641.433.109	Rp197.132.900.462	96,33
Belanja Operasi	Rp85.923.399.777	Rp82.975.135.230	96.57
Belanja Pegawai	Rp13.263.076.750	Rp12.334.533.257	93,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp72.660.323.027	Rp70.640.601.973	97.22
Belanja Modal	Rp118.718.033.332	Rp114.157.765.232	96.16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.654.084.000	Rp4.457.632.597	95.78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp53.193.714.280	Rp51.749.261.182	97.28
Belanja Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi	Rp60.870.235.052	Rp57.950.871.453	95.20

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPUPKP 2024

Capaian serapan anggaran tahun 2024 sebesar 96, 33% dikarenakan adanya sisa lelang.

A.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Tabel 3.2.10.2 Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100%	18.163.241.375	17.052.895.834	93.89
2	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31%	92,16%	102,05%	149.863.198.319	143.763.887.176	95.93
3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52%	60,25%	106,60%	36.614.993.415	36.316.117.452	99.18



No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Total						204.641.433.109	197.132.900.462	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPUPKP 2024

A.4 Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi dipergunakan untuk menampilkan atas efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada setiap sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.10.3 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≤ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks Prasarana Umum Wilayah	102,05%	95.93	4.07
2.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	106,61%	99.18	0.82
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	100%	93.89	6.11

Dari 3 (tiga) sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian kinerjanya telah sesuai bahkan ada yang melebihi target dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan telah mencapai kinerja sebesar 102,05%, dan penyerapan anggaran sebesar 95,93% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,07%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui beberapa pekerjaan yang mengalami sisa lelang, dan adanya pencapaian indikator program yang melebihi target sehingga dapat memanfaatkan sebagian efisiensi tanpa harus menambah anggaran.
2. Sasaran Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan telah mencapai kinerja sebesar 106,61% dan penyerapan anggaran 99.18% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,82%. Efisiensi anggaran diperoleh melalui



pekerjaan yang mengalami sisa pengadaan langsung. Dari anggaran belanja yang menunjang sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.38.705.626.292,00 dengan realisasi Rp.37.850.611.137 telah menyelesaikan kegiatan pada program-program sasaran strategis dengan capaian 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,21%.

3. Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai kinerja sebesar 100% dan dengan efisiensi anggaran sebesar 6,11%.

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU di atas 100% dan ketercapaian program di atas 100%, serta rata-rata capaian kegiatan di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian keuangan 96,33% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak lebih dari 10%.



3.2.8 Analisis Keterkaitan *Gender Analysis Pathway* dengan Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan gender baik dalam pelaksanaan maupun terhadap hasil dan manfaat dari kegiatan yang ada. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun *Gender Analisis Pathway (GAP)* sebagai berikut:

A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah

Tabel 3.2.8.1 *Gender Analisis Pathway* Program Penyelenggaraan Jalan

SKPD		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM		Program Penyelenggaraan Jalan
INDIKATOR KINERJA		Pemeliharaan jalan secara berkala sepanjang 4,67 km
TUJUAN		Terpeliharanya jalan dan <i>guiding block</i> secara rutin untuk masyarakat difabel
DATA PEMBUKA WAWASAN		<ol style="list-style-type: none"> Menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta disebutkan bahwa panjang ruas jalan Kota Yogyakarta adalah 233.231 m'. Sedangkan panjang trotoar di Kota Yogyakarta adalah 186.093 m' Panjang ruas jalan Kota Yogyakarta yang telah difasilitasi <i>guiding block</i> sepanjang 34.526,04 m' Menurut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 akan ada pemeliharaan jalan sepanjang 10,2 km dan pemeliharaan jalan secara berkala sepanjang 6,8 km pada tahun 2024
ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> Kontrol: pasca pembangunan atau saat pemeliharaan, masyarakat kurang memelihara fasilitas umum sehingga tidak sesuai dengan fungsinya seperti pedestrian dipakai untuk PKL atau lahan parkir sehingga mengakibatkan ubin <i>guiding block</i> banyak yang rusak manfaat: belum semua fasilitas pedestrian di Kota Yogyakarta tersedia <i>guiding block</i>
	Sebab Kesenjangan Internal	minimnya penanganan pedestrian sehingga penambahan kerusakan dan penanganannya menjadi tidak seimbang
	Sebab Kesenjangan Eksternal	Masyarakat kurang memelihara fasilitas trotoar sehingga fungsi pedestrian beralih fungsinya menjadi lahan parkir atau tempat jualan PKL yang berakibat <i>guiding block</i> rusak
Reformulasi Tujuan		Tersedianya fasilitas <i>guiding block</i> di pedestrian Kota Yogyakarta sehingga masyarakat difabel dapat mengakses pedestrian dengan aman dan nyaman



Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan jalan dan trotoar di Pedestrian Kota Yogyakarta salah satunya dengan mengganti <i>guiding block</i> yang baru melalui pemeliharaan rutin jalan 2. Pemeliharaan Berkala Jalan dengan melakukan peningkatan jalan dari kerusakan yang terjadi
Basis Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut data di bidang Pemeliharaan Jalan, panjang trotoar di Kota Yogyakarta adalah 186.093 m' 2. Panjang ruas jalan Kota Yogyakarta yang telah difasilitasi <i>guiding block</i> sepanjang 34.526,04 m 3. Menurut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 akan ada pemeliharaan sepanjang 10,2 km pada tahun 2024
Indikator Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan jalan secara berkala sepanjang 4,67 km

Tabel 3.2.8.2 Gender Analisis Pathway Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
KEGIATAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
INDIKATOR KINERJA	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 23.072 titik (titik PJU ramah lingkungan)	
TUJUAN	Tersedianya dan terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Lingkungan dan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Kampung yang ramah untuk kaum wanita	
DATA PEMBUKA WAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menurut proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2020 sebanyak 376.324 jiwa dengan rincian sebanyak 183.251 jiwa penduduk laki-laki dan 193.073 jiwa penduduk perempuan. 2. Kurangnya penerangan jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan untuk kaum wanita yang merupakan mayoritas warga Kota Yogyakarta baik pelecehan seksual ataupun perampokan terlebih untuk wanita pekerja pabrik atau perusahaan dengan program shift sehingga pulang malam 3. Pendorong fenomena klitih di daerah Yogyakarta salah satunya adalah karena penerangan jalan yang kurang 4. Target jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara tahun 2024 adalah 23.072 titik (titik PJU ramah lingkungan) 	
ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan	<p>Akses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjadinya kesalahpahaman warga terkait pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung yang telah dilimpahkan ke wilayah



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Gang kampung yang kecil sehingga mobil tidak bisa masuk gang 3. Tinggi tiang listrik yang terlalu tinggi sehingga mobil crane tidak dapat menjangkau
	Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan dinas seperti mobil crane tidak dapat masuk ke gang-gang kecil sehingga personil harus jalan kaki terlebih dahulu 2. Tinggi tiang listrik yang terlalu tinggi sehingga mobil crane tidak bisa menjangkau
	Sebab Kesenjangan Eksternal	Terdapatnya Perwal Pelimpahan Kewenangan yang mengatur mengenai PJU Lingkungan Kampung yang sudah dilimpahkan ke wilayah tetapi warga tetap saja melapor ke Dinas PUPKP (kendala jaringan PJU masih tetap menjadi kewenangan UPT PJU)
Reformulasi Tujuan		Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan baik PJU Lingkungan dan PJU Lingkungan Kampung
Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perencanaan teknis terkait rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Melaksanakan sosialisasi dengan warga sebelum rehabilitasi dan pemeliharaan dilaksanakan 3. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Basis Data		Tahun 2022 terdapat jumlah PJU Protokol sebanyak 6.628 titik dengan jumlah LED sebanyak 2.143 titik, PJU Lingkungan Kampung sebanyak 5.181 titik dengan jumlah LED sebanyak 1.654 titik, PJU Lingkungan sebanyak 14.879 titik dengan jumlah LED sebanyak 9.157 titik, lampu hias sebanyak 1.613 titik dengan LED sebanyak 1.319 titik dan total PJU sebanyak 28.301 titik dengan total LED sebanyak 14.273 titik.
Indikator Gender		Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 23.072 titik (titik PJU ramah lingkungan)

Tabel 3.2.8.3 Gender Analisis Pathway Program Penataan Bangunan Gedung

SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	Penataan Bangunan Gedung
KEGIATAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
INDIKATOR KINERJA	Terlaksananya renovasi gedung pemerintahan dan terlaksananya pembangunan gedung pemerintahan sebanyak 12 gedung
TUJUAN	Terlaksananya rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan Gedung yang menyediakan akses ramah difabel dan lansia



DATA PEMBUKA WAWASAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 2. Gedung yang telah terfasilitasi ram lantai 1 ada 199 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit 3. Gedung yang telah terfasilitasi ram ke lantai atas ada 6 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit 4. Gedung yang telah terfasilitasi lift ada 7 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit 5. Target untuk gedung yang direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai tahun 2024 sebanyak 12 gedung
ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: belum semua gedung pemerintahan di Kota Yogyakarta yang difasilitasi dengan fasilitas yang ramah difabel dan lanjut usia sehingga masih terdapat kesulitan untuk mengakses fasilitas ramah difabel dan lansia 2. Manfaat: kaum difabel dan lanjut usia belum dapat menikmati fasilitas yang ada secara nyaman dan aman di bangunan pemerintah sehingga kaum difabel harus didampingi saat harus beraktivitas
	Sebab Kesenjangan Internal	Lokasi sekolah yang sempit dan tidak seragam sehingga kesulitan untuk menyediakan akses ramah difabel seperti trotoar jalan masuk ke bangunan
	Sebab Kesenjangan Eksternal	Tidak ada faktor penghambat yang berarti
Reformulasi Tujuan		Terlaksananya rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan Gedung yang menyediakan akses ramah difabel dan lansia
Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Basis Data		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 2. Gedung yang telah terfasilitasi ram lantai 1 ada 199 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit 3. Gedung yang telah terfasilitasi ram ke lantai atas ada 6 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit 4. Gedung yang telah terfasilitasi lift ada 7 dari jumlah bangunan sebanyak 329 unit
Indikator Gender		Terlaksananya renovasi gedung pemerintahan dan terlaksananya pembangunan gedung pemerintahan sebanyak 12 gedung



B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

Tabel 3.2.8.4 Gender Analisis Pathway Program Kawasan Permukiman

SKPD		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM		Program Kawasan Permukiman
KEGIATAN		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
INDIKATOR KINERJA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya di tahun 2024 sebanyak 141 unit rumah 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebanyak 902 unit rumah
TUJUAN		Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni yang didukung dengan PSU yang memadai di Kota Yogyakarta
DATA PEMBUKA WAWASAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta adalah 376.324 jiwa (Hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 dalam Yogyakarta dalam Angka Tahun 2022) 2. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta adalah 34.070 (Yogyakarta dalam angka 2022) 3. Jumlah rumah di Kota Yogyakarta adalah 124.951 (Hasil Interpelasi Citra Pleideas dan Pengolahan Data) 4. Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2022 sebesar 2.187 rumah 5. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH tahun 2023 adalah 761 unit rumah
ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: Persentase masyarakat miskin sebesar 9,05% yang belum sanggup untuk memperbaiki rumahnya sendiri 2. Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> • Besaran bantuan yang belum mencukupi jika untuk mendukung RTLH dengan fasilitas PSU yang memadai sehingga membutuhkan swadaya dengan penerima bantuan • Pemenuhan kriteria penerima bantuan pembangunan rumah untuk MBR relatif sulit karena banyak masyarakat yang tidak mau melakukan swadaya 3. Kontrol: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan antara pendamping dan dampingan yang kurang efektif • Masyarakat penerima bantuan kurang paham mengenai persyaratan rumah layak huni sehingga hanya mengikuti tukang yang membangun rumah 4. Manfaat: Besarnya bantuan yang tidak sebanding dengan kriteria rumah layak huni yang harus dipenuhi
Sebab Kesenjangan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari SDM nya, rasio pendamping dan penerima yang terlalu besar yaitu 1 pendamping mendampingi 30 sampai 50 rumah sehingga kurang intensif



	Berdasarkan SE Nomor: 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menuntut rumah MBR layak huni, rumah berstruktur, terdapat sarana prasarana sanitasi lengkap, mulai dari sumber air bersih, MCK pribadi sampai pengelolaan air limbah yang aman sedangkan bantuannya hanya sebesar Rp20.000.000,00
Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keluarga atau saudara yang iri karena tidak mendapatkan bantuan karena tidak memenuhi kriteria 2. Terdapat masyarakat yang tidak sanggup swadaya terkait pembangunan rumah 3. Terdapat masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan pelaksanaan sesuai juknis <p>MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) belum memiliki pemahaman terkait pembangunan rumah yang layak seperti rumah tahan gempa sehingga MBR hanya mengikuti kinerja tukang</p>
Reformulasi Tujuan	Mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan PSU yang memadai untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan diprioritaskan untuk MBR yang telah memenuhi kriteria terlebih dahulu 2. Mengadakan sosialisasi terkait bantuan stimulan RTLH dengan catatan penerima bantuan mau berswadaya yang melibatkan tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW/LPMK sehingga mereka dapat mendampingi warganya <p>Meminta bantuan Baznas dan atau gotong royong warga untuk membantu penerima bantuan stimulan yang benar-benar kurang mampu</p>
Basis Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta adalah 34.070 (Yogyakarta dalam angka 2022) 2. Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2022 sebesar 2.187 rumah <p>Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH sampai tahun 2023 adalah 761 unit rumah</p>
Indikator Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya di tahun 2024 sebanyak 141 unit rumah <p>Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebanyak 902 unit rumah</p>

Tabel 3.2.8.5 Gender Analisis Pathway Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA	Beroperasinya dan terpeliharanya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai sebanyak 9 unit
TUJUAN	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk peningkatan kesehatan laki-laki dan perempuan



DATA PEMBUKA WAWASAN		<p>RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dengan target 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mencapai SDGs tersebut Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan 9 visi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun salah satu strategi untuk mewujudkan misi dan visi tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagai program prioritas strategis yang mencakup akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Layanan sanitasi berkelanjutan dapat diwujudkan melalui penyusunan SSK yang berkualitas disertai dengan implementasinya yang sistematis dan efektif.</p> <p>Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kota Yogyakarta yang semakin baik menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang memiliki daya tarik bagi para pencari kerja. Kota Yogyakarta juga memiliki potensi pariwisata yang besar hal ini mengakibatkan banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.</p> <p>Di samping itu Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan di mana pada setiap tahunnya selalu didatangi pelajar ataupun mahasiswa yang ingin belajar di Kota Yogyakarta. Kondisi diatas menjadikan Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Seiring bertambahnya jumlah penduduk akan bertambah pula kebutuhan sarana sanitasi dan lingkungan yang sehat.</p>
ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses: akses: lokasi yang tidak bisa diakses jaringan saluran air Tinggi tiang listrik yang terlalu tinggi sehingga mobil crane tidak dapat menjangkau limbah dan lokasi yang terbatas untuk pembangunan IPAL komunal/septic tank komunal/individu 2. Partisipasi: adanya masyarakat yang menolak air limbah domestiknya disalurkan ke SAL 3. Manfaat: masih ada masyarakat yang belum terlayani air limbahnya
ISU GENDER	Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki IPLT 2. Kapasitas truk tinja milik pemerintah daerah terhadap rumah tangga 6.79% 3. Belum adanya Outline-plan air limbah skala kota 4. Tata cara perizinan pembuangan air limbah domestik bagi pemukiman, usaha RT dan perkantoran belum efektif 5. Masih ada limbah domestic yang disalurkan ke sungai
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat masyarakat yang menolak air limbah domestiknya disalurkan ke SAL karena pembangunan kadang ada yang membobol lantai rumah dan pengembalian hanya dengan plester 2. Adanya lokasi yang secara topografi tidak bisa diakses jaringan saluran air limbah 3. keterbatasan lokasi untuk pembangunan IPAL komunal serta septic tank komunal/individu



		4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
Reformulasi Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota 2. Melaksanakan optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota 3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota 2. Melaksanakan optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota 3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Basis Data		<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian tahapan pengembangan Air Limbah Domestik tahun 2021 adalah <ol style="list-style-type: none"> a. Akses sanitasi aman: 35,04% b. Akses sanitasi layak: 63.91% c. Akses belum layak: 1.05% Kemudian di tahun 2024 target untuk tahapan tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Akses sanitasi aman: 36.51% b. Akses sanitasi layak: 63.49% c. Akses belum layak: 0%
Indikator Gender		Beroperasinya dan terpeliharanya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai sebanyak 9 unit



3.3 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintah menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

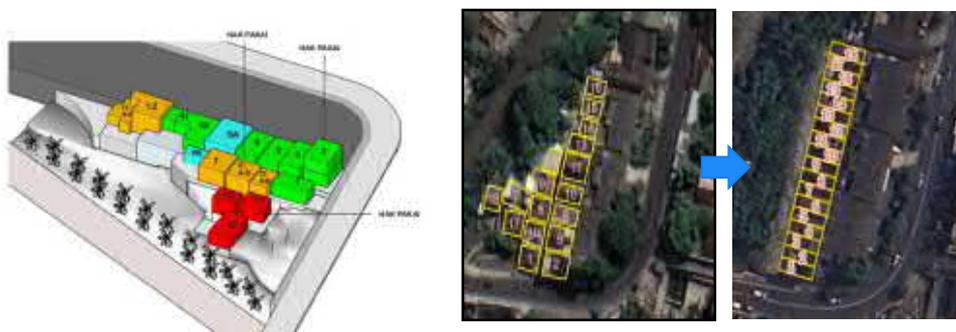
Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menginisiasi inovasi sebagai berikut:

1. MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni Menuju Kampung Madani)

Mahananni merupakan upaya penanganan permukiman kumuh melalui Pola Peremajaan atau pembongkaran dan penataan secara menyeluruh dengan konsep Konsolidasi Lahan.

Mahananni menjawab permasalahan yang menjadi catatan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, yaitu tidak semua lokasi permukiman kumuh dapat diselesaikan melalui pola pemugaran dengan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali). Terutama untuk lokasi dengan ruang hunian yang sempit, berkontur dan berada di tepi tebing sungai yang curam, rawan bencana (banjir dan longsor). Hal ini memerlukan terobosan untuk mengentaskan kumuh di lokasi yang tidak dapat ditangani dengan M3K, sehingga muncul konsep Konsolidasi Lahan.

Konsolidasi Lahan, yaitu menata kembali petak-petak tanah untuk memberikan kecukupan ruang bagi peletakan infrastruktur dasar guna menciptakan lingkungan hunian yang layak serta bebas dari kekumuhan. Konsolidasi Lahan diawali di tanah kasultanan yang ditempati warga masyarakat dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembagian bidang-bidang tanah dan dalam semua tahapan perencanaan penataannya.



Gambar 3.3.1.1 Pola Penanganan melalui Konsolidasi Lahan



Penataan Permukiman Kumuh dengan inovasi Mahananni dengan konsep Konsolidasi Lahan yang dilakukan di Tahun 2024 meliputi Penataan Permukiman Kelurahan Terban RT 02 RW 01 dan Kelurahan Pringgokusuman RW 08.



Gambar 3.3.1.2 Penataan Konsolidasi Lahan Terban RT 02 RW 01

2. QRISNA

Aplikasi QRISNA adalah aplikasi generator kode QR Pembayaran, pengecekan tagihan dan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mulai mengaplikasikan QRISNA untuk pembayaran Retribusi Air Limbah serta Pembayaran Uang Sewa Rusunawa. Salah satu tujuan dari QRISNA adalah mempermudah pembayaran system secara digital serta memberi manfaat bagi pembeli maupun merchant, dikarenakan semua pembayaran non-tunai dapat diawasi dari satu pintu saja baik bagi pembeli maupun merchant.





Gambar 3.3.2.1 Pemanfaatan Aplikasi QRISNA untuk Pembayaran Retribusi Rusunawa

QRISNA merupakan layanan pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai dengan memanfaatkan metode Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat QRIS. Sistem informasi ini bernama QRISNA, QRISNA nantinya akan terintegrasi dengan data tagihan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Yogyakarta serta dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Melalui QRISNA, masyarakat dapat:

- Dapat melakukan pengecekan tagihan berdasarkan NOP
- Dapat melihat QRIS untuk melakukan pembayaran berdasarkan Tagihan yang dipilih
- Dapat melakukan unduh QRIS dinamis
- Dapat melakukan pemindaian kode QRIS saat melakukan pembayaran di Mobile Banking
- Dapat melihat riwayat pembayaran berdasarkan NOP dari Akun JSS yang telah login di QRISNA
- Dapat melakukan pengecekan status pembayaran
- Dapat melakukan unduh invoice pembayaran
- Dapat mencari transaksi berdasarkan NOP yang dientrikan
- Dapat melakukan pengecekan status pembayaran
- Dapat melakukan pembayaran melalui berbagai macam e wallet dan tidak ada biaya admin



3.4 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak/stakeholder dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan pendukung sasaran. Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta megupayakan berbagai bentuk kolaborasi, baik kolaborasi internal maupun kolaborasi eksternal diluar instansi.

3.4.1 Kolaborasi Internal

Kolaborasi Internal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melibatkan beberapa Bidang dan UPT diantaranya kolaborasi antara:

- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dalam kolaborasi program penataan kawasan permukiman di wilayah bantaran sungai.
- Bidang Jalan dan Jembatan dengan Bidang SDA dan Drainase, dalam pengaspalan jalan setelah dilakukan pemeliharaan saluran drainase.
- Bidang Jalan dan Jembatan dengan UPT Pengelolaan Air Limbah, dalam peninggian tutup manhole setelah pengaspalan jalan.
- Bidang Jalan dan Jembatan dengan UPT Penerangan Jalan Umum, dalam penataan trotoar dan furnitur jalan termasuk penerangan jalan umum
- Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan Bidang Penataan Bangunan dalam hal proses penerbitan PBG Bangunan Pemerintahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
-

3.4.2 Kolaborasi Eksternal

Kolaborasi yang multi-aktor dan multi-sektor sangat diperlukan untuk mendorong pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Oleh karena



itu, selain kolaborasi internal dalam OPD, kolaborasi eksternal juga dilakukan dengan stakeholder lain di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Kolaborasi ini sejalan dengan Program Gandeng Gendong yang digagas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu kerjasama diantara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara stakeholder terkait. Kolaborasi dari seluruh stakeholder pembangunan, yaitu 5K: Kota, Kampung, Kampus, Korporasi dan Komunitas tidak hanya penting dalam mendukung pencapaian kinerja namun juga akan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 3.4.2.1 Kolaborasi Gandeng Gendong (5K)

A. Kolaborasi 5K (Kota, Kampung, Kampus, Korporasi dan Komunitas)

1. Kota (Pemerintah Kota)

Kota dalam hal ini Pemerintah Kota berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran daerah. Pemerintah Kota memiliki tugas antara lain sebagai pengambil kebijakan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program dan kerjasama dalam rangka percepatan pembangunan. Tentunya untuk mendukung pencapaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain. Beberapa kolaborasi yang dilakukan antara lain melibatkan:

- Bappeda, dalam hal pengembangan kebijakan/regulasi lintas sektor terkait pembangunan infrastruktur wilayah, sanitasi, dll.
- BPKAD, dalam hal penyusunan penganggaran dan pengelolaan aset.
- DPMPTSP, dalam hal penerbitan izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
- DLH, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan terkait rekomendasi teknis yang disyaratkan dalam permohonan PBG dan SLF
- Dinpertaru, dalam hal penyediaan informasi mengenai tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang, pelaksanaan konsolidasi lahan, serta pemenuhan kebutuhan tanah bagi pembangunan infrastruktur wilayah.



- Dinas Kesehatan, dalam hal sosialisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum akses aman serta sanitasi layak dan aman.
- dsb

Selain kolaborasi dengan Pemerintah Kota, DPUPKP Kota Yogyakarta juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi antara lain dengan DPUPESDM DIY dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya kolaborasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal terkait, antara lain: BPPW, BBWSO, BBPJN, BPPW, BP2P Jawa III, BJKW, dll.

2. Kampung (Masyarakat)

Pembangunan infrastruktur di wilayah tentunya memerlukan kolaborasi dari kampung atau masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam proses pembangunan fisik, diperlukan peran aktif masyarakat sejak awal proses perencanaan untuk memastikan keberlanjutan program. Sebagai contoh, dalam kegiatan penataan kawasan kumuh, masyarakat terdampak menjadi kunci pelaksanaan program melalui kesediaannya untuk di tata serta ikut berperan dalam memberikan gambaran mengenai perencanaan rumahnya sendiri maupun lingkungannya yang akan ditata.

Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan kolaborasi melalui kerjasama swakelola tipe IV dengan Kelompok Masyarakat, dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) juga untuk Pembangunan Rumah Terdampak, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni serta Pembangunan IPAL Komunal.

3. Kampus

Kolaborasi dengan Kampus atau Perguruan Tinggi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 salah satunya adalah kolaborasi perencanaan penataan permukiman kumuh dengan Program Profesi Arsitek (PPAr) Universitas Islam Indonesia (UII). Perencanaan yang dilakukan dengan PPAr UII ini juga melibatkan



masyarakat yang terdampak penataan sehingga dapat memberikan kajian akademis yang mendalam terkait perencanaan penataan.



Gambar 3.4.2.1 Kolaborasi perencanaan permukiman kumuh dengan PPAr UII

Selain itu, kolaborasi dengan Perguruan tinggi juga dilakukan dalam hal kajian atau penelitian tematis, magang kerja, maupun program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

4. Korporasi

Kolaborasi dengan korporasi turut mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2024, diantaranya: PDAM Tirtamarta yang membantu dalam pemenuhan capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kerjasama dengan Bank BPD DIY melalui aplikasi QRISNA untuk kemudahan pembayaran retribusi rusunawa dan retribusi layanan pengelolaan air limbah, serta peran CSR dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

5. Komunitas

Keterlibatan komunitas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, dalam penataan kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar berada di bantaran sungai, komunitas sungai di Kota Yogyakarta antara lain: Forum Komunitas Winongo Asri (FKWA), Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajahwong, Komunitas Peduli Sungai Code (Merti Code) ikut terlibat dalam pelaksanaannya.





**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

YK

BAB IV PENUTUP

- 1. KESIMPULAN**
- 2. RENCANA TINDAK LANJUT**



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Umum Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Dari analisis 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja Perubahan untuk indikator sasaran indeks prasarana umum wilayah meningkat tercapai 102,05%, sasaran indeks prasarana perumahan dan permukiman meningkat tercapai 106,61 % dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat 100,00 %
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
3. Realisasi anggaran pendapatan tahun 2024 melebihi target dengan capaian sebesar 125%
4. Capaian serapan anggaran belanja tahun 2024 sebesar 96,33% dikarenakan adanya sisa lelang.
5. Melihat dari capaian program kegiatan dan anggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan dan anggaran pada tahun 2024 sangat efektif dalam rangka mendukung capaian IKU.

Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran- saran sebagai berikut:



1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK);
3. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.
4. Monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal DPUPKP Kota Yogyakarta secara lebih intensif.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Memperbaiki capaian kinerja dengan menganalisis kembali kebutuhan yang belum terpenuhi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
2. Memperbaiki data-data dasar sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan target capaian program dan kegiatan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya agar lebih optimal untuk menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan mengikut sertakan dalam berbagai diklat teknis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

YK

LAMPIRAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Aksi
4. Hasil Pengukuran Kinerja
5. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akip Tahun Sebelumnya.



DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkualitas Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman dan Sehat

INDIKATOR
Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman

SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

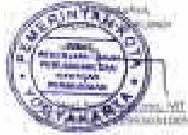
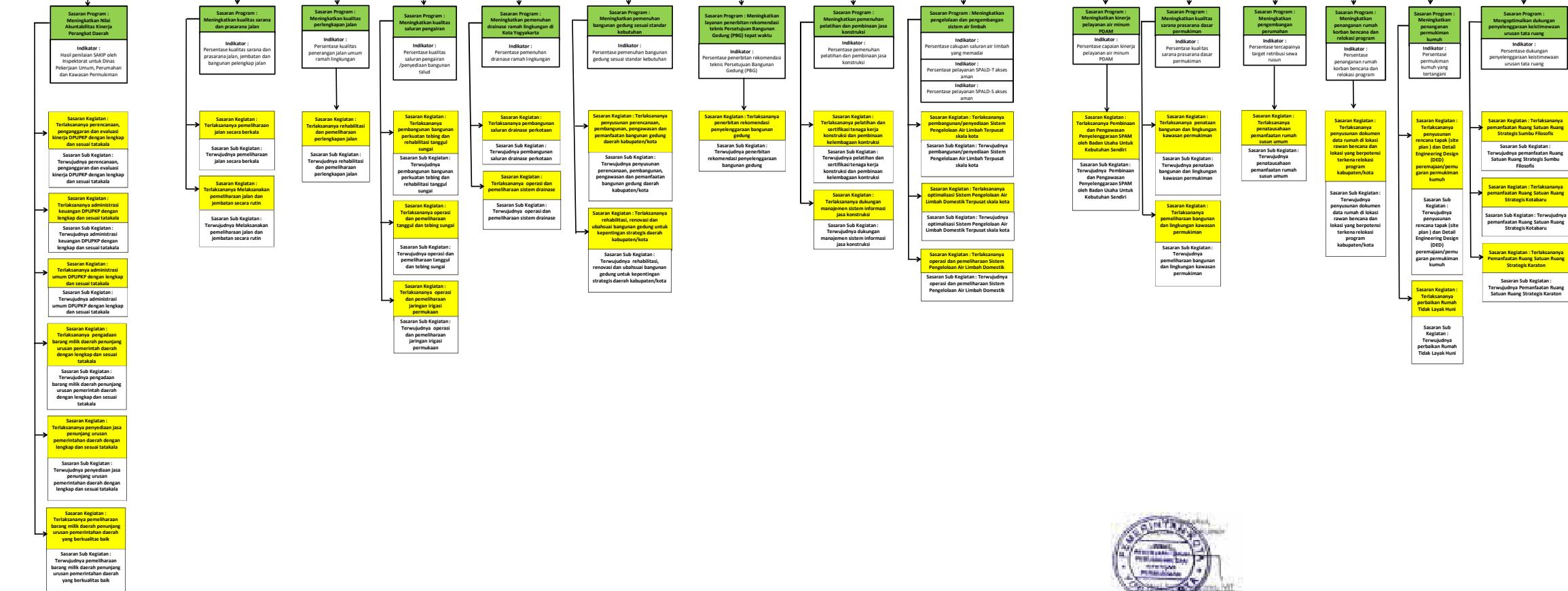
INDIKATOR
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektori

SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah

INDIKATOR
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

SASARAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

INDIKATOR
Indeks prasarana perumahan dan permukiman



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS

DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai
1.1	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	4 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		c. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		d. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
		e. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
1.2	Terlaksananya administrasi keuangan DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala	a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang /bulan
		b. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	12 Laporan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
		SKPD	
1.3	Terlaksananya administrasi umum DPUPKP dengan lengkap dan sesuai tatakala	a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket
		b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
		c. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		d. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		e. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan
1.4	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	a. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137 Unit
		b. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit
1.5	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.6	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	86 Unit

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
		c. Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit
		d. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit
		e. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	18.030.687.975	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	343.165.240	Perubahan APBD 2024
	b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	13.361.523.750	Perubahan APBD 2024
	c. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	690.679.985	Perubahan APBD 2024
	d. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.386.505.000	Perubahan APBD 2024
	e. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	434.958.000	Perubahan APBD 2024
	f. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.813.856.000	Perubahan APBD 2024
	Jumlah Anggaran	Rp	18.030.687.975	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UML AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,


ERNA SUSANTI, S.E.
NIP. 19681119 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Wibawa Dirintis, Amanah Dikerjakan, Berprestasi

Jl. Kenari No, 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGNI SUTANTA, S.I.P.

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : ERNA SUSANTI, S.E.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERNA SUSANTI, S.E.

NIP. 19681119 199603 2 002

AGNI SUTANTA, S.I.P.

NIP. 19690824 199203 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	98 Orang/bulan
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	13.361.523.750	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	13.263.076.750	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	98.447.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	13.361.523.750	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ERNA SUSANTI, S.E.

NIP. 19681119 199603 2 002



AGNI SUTANTA, S.I.P.

NIP. 19690824 199203 1 008



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINI YUNIARTI, S.E.

Jabatan : Perencana Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : ERNA SUSANTI, S.E.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERNA SUSANTI, S.E.

NIP. 19681119 199603 2 002

NINI YUNIARTI, S.E.

NIP. 19700622 199703 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

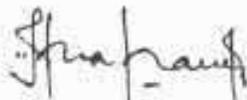
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 343.165.240	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 39.800.000	Perubahan APBD 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	12.092.400	Perubahan APBD 2024
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	6.632.400	Perubahan APBD 2024
	d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	3.535.750	Perubahan APBD 2024
	e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	6.037.300	Perubahan APBD 2024
	f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	275.067.390	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	343.165.240	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,



ERNA SUSANTI, S.E.

NIP. 19681119 199603 2 002

Pihak Pertama,



NINI YUNIARTI, S.E.

NIP. 19700622 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOKHAMAD ZAENURI, S.T.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : ERNA SUSANTI, S.E.

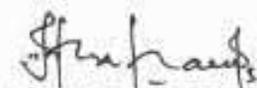
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,


ERNA SUSANTI, S.E.

NIP. 19681119 199603 2 002

Pihak Pertama,


MOKHAMAD ZAENURI, S.T.
NIP. 19770311 201001 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
3.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
4.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
5.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 laporan
6.	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137 Unit
7.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit
8.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
9.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan
10.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
11.	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	86 Unit

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
13.	Terselenggaranya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit
14.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit
15.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	690.679.985	Perubahan APBD 2024
	a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	13.276.100	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	256.137.785	Perubahan APBD 2024
	c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	123.542.500	Perubahan APBD 2024
	d. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	2.100.000	Perubahan APBD 2024
	e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	295.623.600	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.386.505.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp	432.290.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	954.215.000	Perubahan APBD 2024
3.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	434.958.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	25.430.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	117.420.000	Perubahan APBD 2024
	c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	292.108.000	Perubahan APBD 2024
4.	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.813.856.000	Perubahan APBD 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
	a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	51.044.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1.182.072.000	Perubahan APBD 2024
	c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp	20.000.000	Perubahan APBD 2024
	d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	128.700.000	Perubahan APBD 2024
	e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	432.040.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	4.325.998.985	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERNA SUSANTI, S.E.
NIP. 19681119 199603 2 002

MOKHAMAD ZAENURI, S.T.
NIP. 19770311 201001 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BANGUNAN
DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	70,83%
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	a. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 Orang
		b. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 Orang
		c. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga
1.2	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen
		b. Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi
2.	Meningkatnya layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%
2.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	546.842.900	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp	304.659.900	Perubahan APBD 2024
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	242.183.000	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	1.007.608.500	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	1.007.608.500	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	1.554.451.400	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

SIGIT SETIAWAN, S.T., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa Dikinis, Anggun, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTANTI SETYANINGSIH, S.T.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013

Pihak Pertama,

ARTANTI SETYANINGSIH, S.T.
NIP. 19800112 200902 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN BANGUNAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	: Rp 1.007.608.500	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	: Rp 1.007.608.500	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		: Rp 1.007.608.500	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013

Pihak Pertama,

ARTANTI SETYANINGSIH, S.T.
NIP. 19800112 200902 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	120 Orang
2.	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120 Orang
3.	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga
4.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen
5.	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12 Layanan Informasi

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	: Rp 304.659.900	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	: Rp 106.950.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	: Rp 120.000.000	Perubahan APBD 2024
	c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	: Rp 77.709.900	Perubahan APBD 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 242.183.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	: Rp 155.547.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	: Rp 86.636.000	Perubahan APBD 2024
	Jumlah Anggaran	: Rp 546.842.900	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013

Pihak Pertama,

ANTON WICAKSONO, S.T., M.T.
NIP. 19780223 200502 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91.79%
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	a. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan b. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23 Bangunan Gedung 11 Dokumen
2.	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	30.780.706.430	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	30.780.706.430	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp	27.298.176.000	DAIS 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	a. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Rp 27.298.176.000	DAIS 2024
Jumlah Anggaran		Rp 58.078.882.430	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 19790414 200501 1 012



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Wibawa Dinis Saugengta Injeronjogwawana Djogjosekar

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682 Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KETUT WASKITA, S.T.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 197904142005011012

Pihak Pertama,

KETUT WASKITA, S.T.
NIP. 198206182010011020

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	: Rp 1.797.664.150	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 1.797.664.150	Perubahan APBD 2024
	Jumlah Anggaran	: Rp 1.797.664.150	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

FAHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 197904142005011012

Pihak Pertama,

KETUT WASKITA, S.T.
NIP. 198206182010011020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

สำนักงาน Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682 Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 197904142005011012

Pihak Pertama,

BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
NIP. 198203012010011011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	23 Bangunan Gedung
2	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	: Rp 28.983.042.280	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 28.983.042.280	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengelolaan Taman Budaya	: Rp 27.298.176.000	DAIS 2024
	a. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	: Rp 27.298.176.000	DAIS 2024
	Jumlah Anggaran	: Rp 56.281.218.280	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Pertama,

BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
NIP. 198203012010011011



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Widyadarmasana Sanggengsi Injeng Kutha Ngayogyakarta

Jl. Kenari No. 5/1 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.

Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 19800122 200501 2 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,25 %
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	a. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala b. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin c. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4.0753 Km 4.42 Km 4 Jembatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	28.488.484.900	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	28.488.484.900	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	28.488.484.900	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,


HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 19800122 200501 2 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KEPJ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4.42 KM
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		:	Rp	
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	:	Rp 9.109.358.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	:	Rp 7.929.258.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	:	Rp 1.180.100.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		:	Rp 9.109.358.000	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,



HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 198001222005012014

Pihak Pertama,



DWI PUJI SETYANINGSIH, S.T.
NIP. 198204222014032002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa Dikembangkan, Pelayanan Diperluas, dan Kualitas Kerja Ditingkatkan

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIYAN KURNIAWAN, S.T.

Jabatan : Pengawas Jaringan Utilitas selaku Ketua Tim Kerja Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 198001222005012014

Pihak Pertama,

DIYAN KURNIAWAN, S.T.
NIP. 198112212010011014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4.0753 KM

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	: Rp 19.379.126.900	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	: Rp 19.379.126.900	Perubahan APBD 2024
	Jumlah Anggaran	: Rp 19.379.126.900	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,



HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 198001222005012014

Pihak Pertama,



DIYAN KURNIAWAN, S.T.
NIP. 198112212010011014



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦼꦏꦼꦗꦂꦤ꧀ꦸꦩꦸꦩꦸꦥꦸꦫꦸꦩꦩꦏꦏꦤ꧀ꦥꦼꦫꦸꦩꦏꦶꦩꦤ꧀

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 582682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,


UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,



SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	a. Persentase pelayanan SPALD-S akses layak b. Persentase pelayanan SPALD-S akses aman c. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	58,80% 21,05% 19,52%
1.1	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun b. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi c. Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	145 M ³ /Hari 94 Unit 9 Unit
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan air minum PDAM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga
3.	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,98%
3.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata b. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	3 Kawasan 7 Dokumen

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
		Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
4.	a. Meningkatnya pengembangan perumahan b. Meningkatnya penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	a. Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun b. Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	80,00% 100%
4.1	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen
4.2	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	a. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan b. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Dokumen
5	Meningkatnya penanganan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	34,68%
5.1	Terlaksananya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	a. Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar b. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0.6 Ha 95 Unit Rumah
6	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%
6.1	Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 13.400.430.041	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.400.430.041	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
3.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 1.749.388.260	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 1.652.088.260	Perubahan APBD 2024
	b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 97.300.000	Perubahan APBD 2024
5.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 13.800.793.189	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 13.800.793.189	Perubahan APBD 2024
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp 585.000.000	DAIS 2024
	a. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp 585.000.000	DAIS 2024
Jumlah Anggaran		Rp 35.889.794.415	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMLAKHSANTI, M.T.

NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.

NIP. 19770623 200501 1 013



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦲ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦏꦺꦂꦗꦂꦤꦸꦩꦸꦩꦠꦺꦤꦶꦩꦠꦏꦲ
ꦢꦶꦤꦱꦏꦮꦱꦩꦥꦺꦫꦸꦏꦶꦩꦏꦲ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICILIA NOVI HENDRAWATI, M.Eng.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Penataan Infrastruktur Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 197706232005011013

Pihak Pertama,

CICILIA NOVI HENDRAWATI, M.Eng.
NIP. 197811022005012011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terbangunnya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	145 M ³ /Hari
2.	Terlaksananya Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	94 Unit
3.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga
4.	Terlaksananya Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.6 Ha

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 8.571.175.961	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	: Rp 6.913.399.861	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan: Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	: Rp 1.657.776.100	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	: Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
3. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	:	Rp 2.901.681.039	Perubahan APBD 2024
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	:	Rp 2.901.681.039	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran	:	Rp 11.482.967.000	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SENAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623200501101

Pihak Pertama,

CICILIA NOVI HENDRAWATI, M.Eng.
NIP. 197811022005012011



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Widhi Wasana Dharma

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682 Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA RAHMI HAPSARI, M.Eng.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.

NIP. 197706232005011013

Pihak Pertama,


YUNITA RAHMI HAPSARI, M.Eng.

NIP. 197906062005012024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 kawasan
2.	Terlaksananya Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen
3.	Terlaksananya Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dokumen
4.	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95 Unit Rumah
6.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	: Rp 5.916.524.125	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 427.548.800	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	: Rp 97.300.000	Perubahan APBD 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	a. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	: Rp 0	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	: Rp 97.300.000	Perubahan APBD 2024
3.	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	: Rp 10.899.112.150	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	: Rp 10.899.112.150	Perubahan APBD 2024
4.	Kegiatan: Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	: Rp 585.000.000	DAIS 2024
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	: Rp 585.000.000	DAIS 2024
	Jumlah Anggaran	: Rp 17.925.485.075	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 197706232005011013

Pihak Pertama,

YUNITA RAHMI HAPSARI, M.Eng.
NIP. 197906062005012024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas saluran pengairan	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,63%
1.1	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara b. Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.44 Km 0.4 Km
1.2	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 Km
2.	Meningkatnya pemenuhan drainase ramah lingkungan di Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,40%
2.1	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun b. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 6.290.324.295	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.196.870.946	Perubahan APBD 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
	b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.093.453.349	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	16.706.180.364	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.706.180.364	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	22.996.504.659	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.
NIP. 19770909 200501 1 012



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Si Putih Si Putih

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERKA HANUNG WIJAYA, S.T., M.T.S
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.

NIP. 197709092005011012

Pihak Pertama,

HERKA HANUNG WIJAYA, ST., M.T.S

NIP. 197810212005011006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENINGKATAN DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DRAINASE
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.4 KM
2.	Terbangunnya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 3.445.884.138	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	: Rp 3.445.884.138	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	: Rp 11.743.857.998	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	: Rp 11.743.857.998	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		: Rp 15.189.742.136	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.
NIP. 197709092005011012

Pihak Pertama,

HERKA HANUNG WJAYA, ST., M.T.S
NIP. 197810212005011006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa, Wicakara, Widyadarmas, Widyadarmas, Widyadarmas

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISHNA HAMBALI, S.T.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.

NIP. 197709092005011012

Pihak Pertama,

KRISHNA HAMBALI, S.T.

NIP. 1976122220090210

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024
KETUA TIM KERJA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR DRAINASE
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.44 Km
2.	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 Km
3.	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 1.750.986.808	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	:	Rp 1.750.986.808	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 1.093.453.349	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	:	Rp 1.093.453.349	Perubahan APBD 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
3.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 4.962.322.366	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	:	Rp 4.962.322.366	Perubahan APBD 2024
	Jumlah Anggaran	:	Rp 7.806.762.523	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

RAHMAWAN KURNIADI, S.T., M.Eng.
NIP. 197709092005011012

Pihak Pertama,

KRISHNA HAMBALI, S.T.
NIP. 1976122220090210



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

เมืองราชบุรี และจังหวัดราชบุรี
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682

Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.
NIP. 19810620 201001 1 017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUSUNAWA
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target
1.	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen
2.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan
3.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp	1.652.088.260	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp	1.652.088.260	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	8.456.400	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	8.456.400	Perubahan APBD 2024
3.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	111.540.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	111.540.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	1.772.084.660	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.
NIP. 19810620 201001 1 017



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Wibrama Wikana Nugraha, S.T. Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 58 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASARI BUDI DJATMIKA, S.E.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Rusunawa
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.

NIP. 19810620 201001 1 017

Pihak Pertama,



BASARI BUDI DJATMIKA, S.E.

NIP. 197512141998031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target
1.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 laporan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	8.456.400	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	8.456.400	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	111.540.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	111.540.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	119.996.400	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,



KUSWARJANTA ADI NUGRAHA, S.T.
 NIP. 19810620 201001 1 017

Pihak Pertama,



BASARI BUDI DJATMIKA, S.E.
 NIP. 19751214 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Wahana Pahlawan Bangsa
Wahana Pembangunan
Wahana Kesejahteraan

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGARANI MANDAKA, S.T.
Jabatan : Kepala UPT Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

MEGARANI MANDAKA, S.T.
NIP. 19820418 200902 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target
1.	Meningkatkan kualitas perlengkapan jalan	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	81.45%
	a. Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.310 Unit
	1) Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.310 Unit
2.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	34.833.139.930	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	34.833.139.930	Perubahan APBD 2024
	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp	34.833.139.930	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	4.079.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	4.079.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	34.837.218.930	



Pihak Kedua,
UMI AKHSANTI, M.T.
 NIP. 19720926 199803 2 007

Yogyakarta, 20 Agustus 2024
Pihak Pertama,

Megarani

MEGARANI MANDAKA, S.T.
 NIP. 19820418 200902 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PENERANGAN JALAN UMUM
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target
1.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan

No.	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	4.079.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	4.079.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp	4.079.000	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

Megarani
MEGARANI MANDAKA, S.T.
 NIP. 198204182009022004

Pihak Pertama,

Elan Listonugroho
ELAN LISTONUGROHO, S.T.
 NIP. 198306172010011015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target
1.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 8.478.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 8.478.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp 8.478.000	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



NUGROHO INDRATMOKO, ST., MT.
 NIP. 196910021997031006

SUMINA, ST
 NIP. 197007231990031003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

สำนักงาน Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO INDRATMOKO, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007


NUGROHO INDRATMOKO, S.T., M.T.
NIP. 1969002 199703 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target
1.	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	9 Unit
2.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.829.254.080	Perubahan APBD 2024
	a. Sub kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 4.829.254.080	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 8.478.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 8.478.000	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran		Rp 4.837.732.080	

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
 NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,


NUGROHO INDRATMOKO, S.T., M.T.
 NIP. 19691002 199703 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦼꦏꦼꦗꦂꦤ꧀ꦸꦩꦸꦩ꧀ꦥꦼꦫꦸꦩꦩꦏꦸꦁꦏꦼꦩꦸꦏꦶꦩꦤ꧀

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 23 September 2024

Pihak Kedua,



UMI AKHSANTI, M.T. 9

NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.

NIP. 19770623 200501 1 013

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	a. Persentase pelayanan SPALD-S akses layak b. Persentase pelayanan SPALD-S akses aman c. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	58,80% 21,05% 19,52%
1.1	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun b. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi c. Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	145 M ³ /Hari 107 Unit 9 Unit
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan air minum PDAM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga
3.	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,98%
3.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata b. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	3 Kawasan 7 Dokumen

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
		Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
4.	a. Meningkatnya pengembangan perumahan	a. Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	80,00%
	b. Meningkatnya penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	b. Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%
4.1	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen
4.2	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	a. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan b. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Dokumen
5	Meningkatnya penanganan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	34,68%
5.1	Terlaksananya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	a. Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar b. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0.6 Ha 95 Unit Rumah
6	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%
6.1	Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9 Unit

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 13.800.430.041	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.800.430.041	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
3.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	1.749.388.260	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp	1.652.088.260	Perubahan APBD 2024
	b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp	97.300.000	Perubahan APBD 2024
5.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	13.925.992.189	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp	13.925.992.189	Perubahan APBD 2024
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp	585.000.000	DAIS 2024
	a. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp	585.000.000	DAIS 2024
Jumlah Anggaran		Rp	36.414.993.415	

Yogyakarta, 23 September 2024

Pihak Kedua,



UMLAKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623 200501 1 013



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

สำนักงาน Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : UMI AKHSANTI, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMI AKHSANTI, M.T.

NIP. 19720926 199803 2 007

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.

NIP. 19790414 200501 1 012

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91.79%
1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	a. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan b. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24 Bangunan Gedung 11 Dokumen
2.	Mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100%
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 31.065.706.430	Perubahan APBD 2024
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 31.065.706.430	Perubahan APBD 2024
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp 26.928.086.000	Perubahan DAIS 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	a. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Rp 26.928.086.000	Perubahan DAIS 2024
Jumlah Anggaran		Rp 57.993.792.430	

Yogyakarta, 16 Oktober 2024



Pihak Kedua,

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

Pihak Pertama,

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 19790414 200501 1 012



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa Bakti (A)nggraha (I)nggah (S)ampurna (S)elaras (S)elamat (S)elaku

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682 Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,

FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 197904142005011012

Pihak Pertama,

BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
NIP. 198203012010011011

**REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24 Bangunan Gedung
2	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	:	Rp 29.268.042.280	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 29.268.042.280	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengelolaan Taman Budaya	:	Rp 26.928.086.000	Perubahan DAIS 2024
	a. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	:	Rp 26.928.086.000	Perubahan DAIS 2024
	Jumlah Anggaran	:	Rp 56.196.128.280	

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,



FAKHRUL NUR CAHYANTO, ST., M.Eng.
NIP. 197904142005011012

Pihak Pertama,



BUDI ISWANTO, S.T., M.P.W.K.
NIP. 198203012010011011

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terbangunnya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	145 M ³ /Hari
2.	Terlaksananya Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	107 Unit
3.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga
4.	Terlaksananya Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.6 Ha

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 8.971.175.961	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	:	Rp 7.113.399.861	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan: Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	:	Rp 1.857.776.100	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	:	Rp 10.110.000	Perubahan APBD 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
3. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	:	Rp 3.026.880.039	Perubahan APBD 2024
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	:	Rp 3.026.880.039	Perubahan APBD 2024
Jumlah Anggaran	:	Rp 12.008.166.000	

Yogyakarta, 23 September 2024

Pihak Kedua,



SIGIT SETIAWAN, ST., M.Eng.
NIP. 19770623200501101

Pihak Pertama,



CICILIA NOVI HENDRAWATI, M.Eng.
NIP. 197811022005012011



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa Dikembangkan, Aman dan Nyaman, Pelayanan Publik yang Berkualitas

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865,
562682 Fax (0274) 586795

EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI PUJI SETYANINGSIH, S.T.

Jabatan : Pengawas Jaringan Utilitas selaku Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.

Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,

HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 198001222005012014

Pihak Pertama,

DWI PUJI SETYANINGSIH, S.T.
NIP. 198204222014032002

**REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
DPUPKP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4.42 KM
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan
3.	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	: Rp 9.109.358.000	Perubahan APBD 2024
	a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	: Rp 7.929.258.000	Perubahan APBD 2024
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	: Rp 1.180.100.000	Perubahan APBD 2024
2.	Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	: Rp 402.720.000	Perubahan DAIS 2024
	a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	: Rp 402.720.000	Perubahan DAIS 2024
Jumlah Anggaran		: Rp 9.512.078.000	

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,



HASRI NILAM BASWARI, M.Ec.Dev.
NIP. 198001222005012014

Pihak Pertama,



DWI PUJI SETYANINGSIH, S.T.
NIP. 198204222014032002

**REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31 Indeks
2.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52 Indeks
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.163.241.375	Perubahan APBD 2024
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp6.290.324.295	Perubahan APBD 2024
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp10.110.000	Perubahan APBD 2024
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp13.800.430.041	Perubahan APBD 2024
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp16.706.180.364	Perubahan APBD 2024
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp32.073.314.930	Perubahan APBD 2024
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp6.344.072.925	Perubahan APBD 2024
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp32.082.589.900	Perubahan APBD 2024
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp546.842.900	Perubahan APBD 2024
10.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.749.388.260	Perubahan APBD 2024
11.	Program Kawasan Permukiman	Rp13.925.992.189	Perubahan APBD 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp34.833.139.930	Perubahan APBD 2024
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp27.513.086.000	Perubahan DAIS 2024
14.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp402.720.000	Perubahan DAIS 2024
Jumlah Anggaran		Rp204.441.433.109	

Yogyakarta, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua,



[Signature]

SUGENG PURWANTO, M.M.A.
NIP. 19650525 199103 1 017

Pihak Pertama,



[Signature]

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 19720926 199803 2 007

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHLIN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2024				Program/Kegiatan/Keluaran	Tingkat Likur Program/Kegiatan	Target 2024				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,14 Skala 1-100	90,14 Skala 1-100	90,14 Skala 1-100	90,00 Skala 1-100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALU LINTAS DAN ANGRUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemertangan jalan umum ramah lingkungan	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	34.833.139.930
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan Upt Pemertangan Jalan Umum		17,33%	59,95%	94,73%	59,95%	34.833.139.930
							Jumlah perlempangan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara	1.010,00 unit	17,33%	59,95%	94,73%	99,99%	29.731.380.430
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27.513.086.000
							Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		0,06%	30,07%	71,71%	100,00%	26.928.086.000
							Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II	1,00 unit	0,06%	30,07%	71,71%	100,00%	27.298.176.000
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		0,00%	51,00%	100,00%	100,00%	585.000.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9,00 unit	0,00%	51,00%	100,00%	100,00%	585.000.000
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	402.720.000
							Pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Kasultanan dan Kaduaten		0%	0%	0%	100,00%	402.720.000
							Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Sesuai Ruang Strategis Kolaborasi	1 Dokumen	0%	0%	0%	100,00%	402.720.000
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas tahap dan saluran irigasi kondisi baik	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	6.290.324.295
							Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		6,85%	50,46%	89,38%	100,00%	1.750.986.808
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,44 Km	6,85%	50,46%	89,38%	100,00%	1.745.588.808
							Rehabilitasi Tanggul Sungai		5,51%	21,68%	53,43%	100,00%	3.445.894.138
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,40 Km	5,51%	21,68%	53,43%	100,00%	3.490.130.000
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		12,26%	51,87%	89,37%	100,00%	1.093.453.349
							Panjang jaringan irigasi permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,50 Km	12,26%	51,87%	89,37%	100,00%	1.083.453.349
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemertangan drainase kondisi baik	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	16.706.180.364
							Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		5,20%	31,82%	78,38%	100,00%	11.743.857.998
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3,00 Sistem Drainase Perkotaan	5,20%	31,82%	78,38%	100,00%	12.499.896.000
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		6,41%	70,96%	86,52%	100,00%	4.962.322.366
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3,00 Sistem Drainase Perkotaan	6,41%	70,96%	86,52%	100,00%	4.752.122.366
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemertahan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	32.073.314.930
							Pengabstusian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2,35%	95,51%	90,65%	100,00%	29.268.042.280

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	18,00 %	41,00 %	79,00 %	100,00 %	9.032.400
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00 %	12,00 %	100,00 %	100,00 %	6.632.400
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	0,00 %	12,00 %	100,00 %	100,00 %	9.032.400
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		29,00 %	63,00 %	96,00 %	100,00 %	3.535.750
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	29,00 %	63,00 %	96,00 %	100,00 %	9.012.400
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0,00 %	0,00 %	52,00 %	100,00 %	6.037.300
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0,00 %	0,00 %	52,00 %	100,00 %	8.012.400
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		14,68 %	50,37 %	87,24 %	100,00 %	275.067.390
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6.00 Laporan	13,66 %	50,37 %	87,24 %	100,00 %	259.851.890
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		35,90 %	75,48 %	99,03 %	100,00 %	13.263.076.750
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98.00 orang	35,90 %	75,48 %	99,03 %	100,00 %	13.992.674.750
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24,00 %	92,00 %	77,00 %	100,00 %	98.447.000
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	24,00 %	92,00 %	77,00 %	100,00 %	94.721.900
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	13.276.100
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	13.276.100
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30,07 %	55,05 %	80,02 %	100,00 %	256.137.785
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	30,07 %	55,05 %	80,02 %	100,00 %	255.882.785
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		88,74 %	79,30 %	89,86 %	100,00 %	123.542.500
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	88,74 %	79,30 %	89,86 %	100,00 %	123.542.500
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %	2.100.000
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	30,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %	2.100.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35,00 %	65,00 %	96,00 %	100,00 %	316.637.000

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.00 Laporan	31.00 %	65.00 %	96.00 %	100.00 %	233.084.000
					Pengadaan Mebel		43,45%	86,89%	93,45%	100,00%	432.290.000
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137.00 Unit	43.45 %	86.89 %	93.45 %	100.00 %	211.750.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00%	100,01%	100,01%	100,01%	954.215.000
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80.00 Unit	0.00 %	100.01 %	100.01 %	100.01 %	124.564.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	25.430.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	20.00 %	50.00 %	80.00 %	100.00 %	25.430.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	228.960.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	301.320.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	292.108.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	292.108.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	51.044.000
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	55.818.600
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		33,24%	62,97%	88,07%	99,99%	1.182.072.000
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	88.00 unit	33.24 %	62.97 %	88.07 %	99.99 %	1.279.350.200
					Pemeliharaan Mebel		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30.000.000
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	90.00 unit	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36,43%	74,70%	95,26%	100,00%	128.700.000
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149.00 unit	36.43 %	74.70 %	95.26 %	100.00 %	128.700.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3,94%	80,32%	99,99%	99,99%	432.040.000
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 unit	3.94 %	80.32 %	99.99 %	99.99 %	432.040.000



**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024
TRIWULAN IV**

No.	Sasaran Strategis Daerah	Indikator Sasaran Strategis Daerah	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Rata-rata	Program/Agenda/Tahap Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Rata-rata	Anggaran Tahun 2024	Capaian Anggaran Triwulan IV			Pencapaian
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum wilayah																			
		Indeks pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
								PROGRAM PENTYINGKIHAN ALAS	Pemertase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	82,28%	82,28	82,28	101,20%	\$2.382.589.900,00	\$2.382.589.900,00	\$2.382.589.900,00	100,00%	KEPALA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	
								Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perajang jalan yang Dipertahakan Secara Berkala	4.7382 km	4.7382km	1,001km	123%	\$2.382.589.900,00	\$2.382.589.900,00	\$2.382.589.900,00	100,00%		
								Pemeliharaan Sirtah jalan	Perajang jalan yang Dipertahakan Secara Berkala	1,09 km									
								Pemeliharaan Rata jembatan	Jumlah jembatan yang Sirtah secara rutin	4,39 jembatan				\$2.973.231.900,00	\$2.973.231.900,00	\$2.973.231.900,00	100,00%		
								Pemeliharaan Rata jalan	Perajang jalan yang Dipertahakan Secara Rutin	4,42 km				\$1.385.358.000,00	\$1.385.358.000,00	\$1.385.358.000,00	100,00%		
														\$7.428.258.000,00	\$7.428.258.000,00	\$7.428.258.000,00	100,00%		
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pemertase kualitas sumber dan saluran irigasi sesuai baik	92,89%	92,89	92,89	1000%	\$3.390.324.295,00	\$3.390.324.295,00	\$3.390.324.295,00	100,00%	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASASI	
								Kegiatan Pengontrolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (Watasah 1) JustuDaerah Kabupaten/Kota	Perajang Tanggul dan Talang Sungai yang Dipertahakan	0,44 km	0,44 km	0,44km	100%	\$1.196.870.948,00	\$1.196.870.948,00	\$1.196.870.948,00	100,00%		
								Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Talang Sungai	Perajang Tanggul dan Talang Sungai yang Dipertahakan	0,40 km				\$1.750.989.808,00	\$1.750.989.808,00	\$1.750.989.808,00	100,00%		
								Rehabilitasi Tanggul Sungai	Perajang Tanggul Sungai yang Rehabilitasi	0,40 km				\$1.443.894.338,00	\$1.443.894.338,00	\$1.443.894.338,00	100,00%		
								Kegiatan Pengembangan dan Pengadaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Perajang jaringan Irigasi Perumahan yang Diperbaiki dan Dipertahakan	0,3 km	0,3 km	0,3 km	100%	\$1.893.453.348,00	\$1.893.453.348,00	\$1.893.453.348,00	100,00%		
								Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi perumahan	Perajang jaringan Irigasi Perumahan yang Diperbaiki dan Dipertahakan	0,30 km				\$1.993.453.348,00	\$1.993.453.348,00	\$1.993.453.348,00	100,00%		
								PROGRAM PENGELOLAAN LAKS KONSTRUKSI	Pemertase pemertase pelatihan dan sertifikasi jasa konstruksi yang terakreditasi	70,88%	70,88	70,88	140,88%	\$46.842.000,00	\$46.842.000,00	\$46.842.000,00	100,00%	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BANGUNAN DAN PEMERIKSAAN LAKS KONSTRUKSI	
								Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih	120 Orang	120 Orang	122 orang	101,67%	\$0.458.800,00	\$0.458.800,00	\$0.458.800,00	100,00%		
								Facilitas/Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Disertifikasi Sertifikasi	120,00 orang									
								Pemertase dan Pengawasan Sertifikasi Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Aktif dan Deregistrasi Kelembagaan	0,00 lembaga				\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00	100,00%		
								Peraturan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Disertifikasi Sertifikasi	120,00 orang				\$7.709.900,00	\$7.709.900,00	\$7.709.900,00	100,00%		
														\$106.950.000,00	\$106.950.000,00	\$106.950.000,00	100,00%		
								Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2	100%	\$42.183.000,00	\$42.183.000,00	\$42.183.000,00	100,00%		
								Pelayanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	2,00 Dokumen									
								Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2,00 layanan Informasi					\$193.547.000,00	\$193.547.000,00	\$193.547.000,00	100,00%	
														\$6.634.000,00	\$6.634.000,00	\$6.634.000,00	100,00%		
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE	Pemertase pemertase drainase sesuai baik	86,40%	86,4	86,44	100,00%	\$6.706.180.364,00	\$6.706.180.364,00	\$6.706.180.364,00	100,00%	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASASI	
								Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perumahan yang Dibangun	0 sistem	0	0	100%	\$6.706.180.364,00	\$6.706.180.364,00	\$6.706.180.364,00	100,00%		
								Pembangunan Sistem Drainase Perumahan	Jumlah Sistem Drainase Perumahan yang Dibangun	0m Sistem Perumahan				\$1.193.807.948,00	\$1.193.807.948,00	\$1.193.807.948,00	100,00%		

	Kegiatan Pemeliharaan/Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4	100%	343.283.240,00	343.283.240,00	336.537.000,00	97,99%
	Pemrosesan Dokumen Pemeliharaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemrosesan Perangkat Daerah	4.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	26.800.000,00	26.800.000,00	26.282.750,00	98,06%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	12.091.400,00	12.091.400,00	9.028.500,00	74,66%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-0000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	6.632.400,00	6.632.400,00	6.036.950,00	91,01%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	3.523.750,00	3.523.750,00	3.488.000,00	99,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	6.037.300,00	6.037.300,00	5.555.000,00	92,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6.000 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	273.067.200,00	273.067.200,00	272.270.250,00	99,71%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang /bulan	88 Orang /bulan	88	100%	13.961.823.750,00	13.961.823.750,00	13.432.371.257,00	96,25%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	88 orang	100,00%	100,00%	100,00%	13.281.076.750,00	13.281.076.750,00	13.236.521.257,00	99,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	94.447.000,00	94.447.000,00	93.816.000,00	99,30%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Suplemen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8	100%	711.893.385,00	711.893.385,00	696.128.000,00	97,81%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Suplemen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.000 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	23.275.100,00	23.275.100,00	23.173.000,00	99,57%
	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	6.000 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	256.237.785,00	256.237.785,00	251.290.000,00	98,06%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.000 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	123.542.500,00	123.542.500,00	122.557.000,00	99,20%
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perunggang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perunggang-undangan yang Disediakan	1.000 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	100,00%
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Simulasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Simulasi SKPD	150.000 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	376.617.000,00	376.617.000,00	366.107.000,00	97,21%
	Kegiatan Pengadaan Barang MIBK Daerah Persegi Panjang Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mibel yang Disediakan	137 lot	137 lot	137	100%	1.386.505.000,00	1.386.505.000,00	1.373.763.825,00	99,09%
	Pengadaan Mibel	Jumlah Paket Mibel yang Disediakan	137 lot	100,00%	100,00%	100,00%	432.190.000,00	432.190.000,00	429.600.000,00	99,42%
	Pengadaan Perawatan dan Mesin Laminasi	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Laminasi yang Disediakan	80 Unit/lot	100,00%	89,57%	99,00%	934.215.000,00	934.215.000,00	944.075.000,00	101,16%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Persewaan Urutan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Sewa Menyewa	1 laporan	1 laporan	1	100%	948.408.000,00	948.408.000,00	941.868.408,00	99,21%
	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Sewa Menyewa	1.000 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	25.430.000,00	25.430.000,00	25.430.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Konstruksi/Gedung Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.500 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	278.360.000,00	278.360.000,00	273.010.408,00	98,44%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.000 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	292.238.000,00	292.238.000,00	290.808.000,00	99,51%
	Kegiatan Pemeliharaan barang MEA Daerah Persegi Panjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2	100%	1.084.824.000,00	1.084.824.000,00	1.084.824.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baga Pemeliharaan dan Rajat Kendaraan Persewaan (Baga atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Persewaan (Baga atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pajaknya	2.000 unit	100,00%	100,00%	100,00%	32.064.000,00	32.064.000,00	31.769.400,00	99,04%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kios Persewaan Pagar dan Perbaikan Kandang (Jasa Operasional atau Lain-lain)	Jumlah Kandang Sisa Operasional dan Lahan yang Diperluas dan Dibuatkan Pagar dan Pemasannya	88.00 unit								
	Pemeliharaan Meja	Jumlah Meja yang Diperluas	80.00 unit	100,00%	100,00%	100,00%	1.182.172.000,00	1.182.172.000,00	1.769.209.200,00	90,44%	
	Pemeliharaan Perabot dan Meja Lain-lain	Jumlah Perabot dan Meja Lain-lain yang Diperluas	144.00 unit	100,00%	100,00%	100,00%	20.000.000,00	20.000.000,00	19.801.000,00	99,00%	
	Pemeliharaan/teknisitas Gedung Sempur dan Bangunan Lain-lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain yang Diperluas/Direhabilitasi	2.00 unit	100,00%	99,99%	99,99%	422.240.000,00	421.041.000,00	427.541.000,00	99,66%	

Faktor Pendukung:

- >1. Adanya anggaran nasional dalam bentuk proposal untuk pengaspalan jalan serta kegiatan masyarakat sekitar DS dan UPR terkait jasa beresung dan kerucut teras 2. Koneksi secara internal di internal dan eksternal (pemerda) hingga terlah pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat sesuai standar dan sesuai dengan baik
- >2. Kualitas penyedia yang mampu dalam pekerjaan terkait pemeliharaan lahan dan sapra pemukiman di. Koneksi yang internal antara PIC, penyedia, TIU dan masyarakat di. Dengan masyarakat dalam bentuk kepengawasan administrasi untuk program layanan pemukiman sehingga dapat berjalan lancar
- >3. Pelaksanaan sesuai dengan tabel 2. Koneksi internal antara pihak internal dan eksternal

Uraian Pemaksimalan:

- >1. Suatu yang barang mendukung sehingga pekerjaan hampir selesai dan pekerjaan baik selesai terlambat tapi dapat beres sesuai dengan kontrak 2. Koneksi internal yang kurang mampu, baik dalam hal internal dan manajemen tenaga kerja
- >Adanya idad lengkap karena telah jalan yang tinggi sehingga Dinas PUPD mendapat arahan dari DPRD untuk menangan 1 pekerjaan terkait di daerah Kabupaten untuk kurang lebih Rp200.000.000,00. Pelaksanaan pekerjaan 45 hari kalender sejak 31 Desember 2024.
- >Gakman UI dan pemuda tidak tepat waktu

Rencana Tindak Lanjut:

- >Koneksi internal dengan penyedia sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai target dan tabel 2
- >Koneksi dengan Penyedia dan DPRD untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tabel anggaran 2024.
- >Koneksi lebih lanjut dengan penyedia yang terlibat memonitor dan lakukan DSI



**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,31 Skala 1-100	[35% (Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga) + 30% (Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase) + 20% (Capaian kinerja penataan bangunan gedung) + 5% (Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] dikali 100	92,16 Skala 1-100	102,05		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJAJ)	34.833.135.930,00	33.480.806.466,00	96,12	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	27.513.086.000,00	27.344.475.180,00	99,39	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	402.720.000,00	402.670.000,00	99,98	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.290.324.295,00	5.941.549.413,00	94,46	
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	16.706.180.364,00	16.174.514.750,00	96,82	
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.073.314.930,00	30.623.548.057,00	95,48	
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.073.314.930,00	30.623.548.057,00	95,48	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.082.589.900,00	29.880.447.165,00	93,14	
								PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	546.842.900,00	500.876.145,00	91,59	
2.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	56,52 Skala 1-100	[50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100	60,25 Skala 1-100	106,61		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	27.513.086.000,00	27.344.475.180,00	99,39	
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.125.992.189,00	14.071.729.429,00	99,62	
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.110.000,00	10.094.000,00	99,84	
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.800.430.041,00	13.648.320.129,00	98,9	
								PROGRAM PENATAAN RANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.344.022.925,00	6.276.635.858,00	98,94	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2024				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2024				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	90,14 Skala 1-100	90,14 Skala 1-100	90,14 Skala 1-100	90,00 Skala 1-100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	34.833.138.930
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan Upt Penerangan Jalan Umum		17,33%	99,95%	94,23%	99,99%	34.833.138.930
							Jumlah perlekangan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara	1310,00 unit	17,33%	99,95%	94,23%	99,99%	29.731.385.430
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27.513.086.000
							Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		0,06%	30,07%	71,71%	100,00%	26.928.086.000
							Pembangunan Gedung Taman Budaya (Tribung Giwangan Tahap II)	1,00 unit	0,06%	30,07%	71,71%	100,00%	17.298.176.000
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		0,00%	51,00%	100,00%	100,00%	585.000.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	0,00 unit	0,00%	51,00%	100,00%	100,00%	585.000.000
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	402.720.000
							Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten		0%	0%	0%	100,00%	402.720.000
							Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1 Dokumen	0%	0%	0%	100,00%	402.720.000
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	6.290.324.295
							Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		6,85%	50,46%	69,38%	100,00%	1.750.986.808
							Parang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,44 Km	6,85%	50,46%	69,38%	100,00%	1.745.586.808
							Rehabilitasi Tanggul Sungai		5,51%	71,68%	53,43%	100,00%	3.445.884.138
							Parang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,40 Km	5,51%	71,68%	53,43%	100,00%	3.680.530.000
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		12,26%	51,87%	89,17%	100,00%	1.093.453.349
							Parang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,50 Km	12,26%	51,87%	89,17%	100,00%	1.091.453.349
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	16.706.180.364
							Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		5,20%	31,82%	78,38%	100,00%	11.743.857.998
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3,00 Sistem Drainase Perkotaan	5,20%	31,82%	78,38%	100,00%	11.499.996.000
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		6,41%	70,96%	86,52%	100,00%	4.962.322.366
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3,00 Sistem Drainase Perkotaan	6,41%	70,96%	86,52%	100,00%	4.757.122.366
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	27.073.314.930
							Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2,35%	35,51%	80,65%	100,00%	29.268.042.200

					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dibehusaiakan	24.00 bangunan gedung	2,35 %	35,31 %	80,65 %	100,00 %	33.422.774.790
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dibehusaiakan	24.00 bangunan gedung	2,35 %	35,31 %	80,65 %	100,00 %	33.422.774.790
					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3,20%	39,72%	85,45%	100,00%	1.797.664.150
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.00 Dokumen	3,20 %	39,72 %	85,45 %	100,00 %	1.430.946.150
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.00 Dokumen	3,20 %	39,72 %	85,45 %	100,00 %	1.430.946.150
					Penyelenggaraan Penerbitan Persewaan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi ANI (TPA), Tim Penilai Teknik (TPT), Penilik, dan		23,81%	52,34%	76,14%	99,99%	1.007.608.500
					Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persewaan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), peran Tim Profesi ANI (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12.00 Dokumen	23,81 %	52,34 %	76,14 %	99,99 %	862.287.000
					Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persewaan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), peran Tim Profesi ANI (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12.00 Dokumen	23,81 %	52,34 %	76,14 %	99,99 %	862.287.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
					Pemeliharaan Berkala Jalan		0,25%	17,61%	57,35%	99,98%	22.973.231.900
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,09 Km	0,25 %	17,61 %	57,35 %	99,98 %	4.856.201.000
					Pemeliharaan Rutin Jembatan		40,74%	40,78%	68,70%	100,01%	1.190.100.000
					Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	4,00 jembatan	40,74 %	40,78 %	68,70 %	100,01 %	776.635.000
					Pemeliharaan Rutin Jalan		26,33%	52,18%	72,40%	98,50%	7.979.258.000
					Panjang jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4,42 km	26,33 %	52,18 %	72,40 %	98,50 %	7.464.880.500
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
					Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi		70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	546.842.900
					Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis		40,00%	65,00%	100,00%	100,00%	120.000.000

						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120.00 orang	40.00%	85.00%	100.00%	100.00%	120.000.000	
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		27,00%	52,00%	78,00%	100,00%	77.709.900	
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan kapasitasnya	10.00 lembaga	27.00%	52.00%	78.00%	100.00%	79.709.900	
						Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		33,53%	75,69%	99,96%	100,00%	106.950.000	
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	120.00 orang	33.53%	75.69%	99.96%	100.00%	106.950.000	
						Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		18,33%	95,65%	99,88%	100,00%	155.547.000	
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan	2.00 Dokumen	18.33%	95.65%	99.88%	100.00%	157.860.000	
						Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		10,50%	78,00%	89,00%	100,00%	86.634.000	
						Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioptimalkan	12.00 layanan informasi	10.50%	78.00%	89.00%	100.00%	87.296.000	
7	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	55,87 Skala 1-100	55,87 Skala 1-100	55,87 Skala 1-100	56,00 Skala 1-100	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27.513.086.000
						Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota		0,06%	30,07%	71,71%	100,00%	26.928.086.000	
						Pembangunan Gedung Taman Budaya Entbung Girawang Tahap II	1.00 unit	0.06%	30.07%	71.71%	100.00%	27.289.176.000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya		0,00%	51,00%	100,00%	100,00%	585.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	9.00 unit	0.00%	51.00%	100.00%	100.00%	585.000.000	
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	14.125.992.189	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		8,55%	54,65%	90,21%	100,01%	3.226.890.099	
						Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.60 ha	8.55%	54.65%	90.21%	100.01%	3.487.857.000	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		25,27%	60,39%	93,11%	99,99%	10.899.112.150	
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95.00 Unit	25.27%	60.39%	93.11%	99.99%	10.860.830.750	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10.110.000	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		8,37%	35,29%	41,27%	100,00%	10.110.000	
						Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1.00 lembaga	8.37%	35.29%	41.27%	100.00%	8.360.000	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		38,00%	58,00%	58,00%	58,00%	13.800.430.041	
						Optimisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		22,96%	55,68%	99,91%	99,99%	1.857.776.100	
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalkan	94.00 unit	22.96%	55.68%	99.91%	99.99%	329.000.000	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	88,00 %	41,00 %	79,00 %	100,00 %	9.032.400
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00%	12,00%	100,00%	100,00%	6.632.400
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	0,00 %	12,00 %	100,00 %	100,00 %	9.032.400
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		39,00%	63,00%	96,00%	100,00%	3.525.750
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	39,00 %	63,00 %	96,00 %	100,00 %	8.012.400
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0,00%	0,00%	52,00%	100,00%	6.827.300
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0,00 %	0,00 %	52,00 %	100,00 %	8.012.400
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13,66%	50,37%	87,24%	100,00%	275.067.390
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00 Laporan	13,66 %	50,37 %	87,24 %	100,00 %	259.651.890
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		35,90%	75,48%	99,03%	100,00%	13.263.076.750
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98.00 orang	35,90 %	75,48 %	99,03 %	100,00 %	13.992.674.750
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24,00%	52,00%	77,00%	100,00%	98.447.000
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	24,00 %	52,00 %	77,00 %	100,00 %	94.721.900
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13.276.100
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	13.276.100
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30,07%	55,05%	80,92%	100,00%	256.137.785
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	30,07 %	55,05 %	80,92 %	100,00 %	255.882.785
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		68,74%	79,30%	89,86%	100,00%	123.542.500
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	68,74 %	79,30 %	89,86 %	100,00 %	123.542.500
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	2.100.000
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	80,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %	2.100.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35,00%	65,00%	96,00%	100,00%	316.637.000

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.00 Laporan	35.00 %	65.00 %	96.00 %	100.00 %	233.084.000
						Pengadaan Mebel		43,45%	86,89%	93,45%	100,00%	432.290.000
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137.00 Unit	43.45 %	86.89 %	93.45 %	100.00 %	211.750.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00%	100,01%	100,01%	100,01%	954.215.000
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80.00 unit	0.00 %	100.01 %	100.01 %	100.01 %	123.264.000
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	25.430.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	20.00 %	50.00 %	80.00 %	100.00 %	25.430.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	228.960.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	301.320.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	292.108.000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	292.108.000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	51.044.000
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.00 Unit	26.00 %	51.00 %	76.00 %	100.00 %	53.818.800
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perlunan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		33,24%	62,97%	88,07%	99,99%	1.182.072.000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88.00 unit	33.24 %	62.97 %	88.07 %	99.99 %	1.279.350.300
						Pemeliharaan Mebel		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20.000.000
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	90.00 unit	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.000.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36,43%	74,70%	95,26%	100,00%	128.700.000
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149.00 unit	36.43 %	74.70 %	95.26 %	100.00 %	128.700.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3,94%	80,32%	99,99%	99,99%	432.040.000
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 unit	3.94 %	80.32 %	99.99 %	99.99 %	432.040.000



MATRIKS TINDAK LANJUT PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
1	Pengukuran Kinerja	Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja. Data kinerja yang digunakan bukan data pada tahun pelaporan	Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala agar data yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja relevan dengan tahun pelaporan	Telah melakukan perbaikan data kinerja melalui koordinasi dengan bidang pengampu data program	Review data perbaikan kinerja
2	Pelaporan kinerja	Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja karena terdapat data yang kurang relevan dalam penghitungan indikator sasaran program	Meningkatkan kualitas kinerja dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan menyajikan data yang relevan terkait penghitungan indikator program yang akan mempengaruhi penghitungan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Akan meningkatkan kualitas laporan kinerja dan memperbaiki perhitungan indikator program yang akan mempengaruhi perhitungan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Review data perbaikan kinerja

Yogyakarta, 09 Juli 2024

PIL Kepala Dinas PUPKP

Kapda Bappeda

